



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

---

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dari LKjIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Selanjutnya, Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan ini berisi empat bagian utama, yaitu: Bab 1: Pendahuluan, Bab 2 : Perencanaan Kinerja, Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja dan terakhir adalah Bab 4: Penutup.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak terkait. Akhirnya, kami menyadari bahwa dokumen laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan bagi perbaikan sangat diharapkan.

Tembilahan, Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
Persandian dan Statistik  
Kabupaten Indragiri Hilir



Dr. Trio Beni Putra, SE., MM  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19751126 199802 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	1
C. Tugas dan Fungsi.....	2
D. Struktur Organisasi.....	3
E. Isu Strategis.....	3
F. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>6</b>
A. Rencana Strategis.....	6
B. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	7
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>11</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	11
2. Nilai Keterbukaan Informasi.....	25
3. Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik .....	29
4. Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit .....	33
5. Nilai AKIP Diskominfo.....	37
B. Realisasi Anggaran .....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Rekomendasi.....	49
<b>LAMPIRAN</b>	
• SK Tim Penyusun LKjIP Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023	
• Perjanjian Kinerja	
• Matrix Rencana Aksi Kinerja	

- Monitoring Evaluasi RKPD
- Laporan Fisik dan Keuangan
- Prestasi dan Penghargaan Perangkat Daerah.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi .....	3
Gambar 3. 1 Hasil Evaluasi Indeks SPBE Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 .....	12
Gambar 3. 2 Hasil Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau.....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Matrix Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja .....	7
Tabel 2. 2	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik.....	10
Tabel 3. 1	Capaian Tujuan Tahun 2023 Indeks SPBE.....	11
Tabel 3. 2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Terakhir Indeks SPBE .....	14
Tabel 3. 3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Indeks SPBE dengan Target Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 .....	15
Tabel 3. 4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Level Nasional / Internasional Indeks SPBE.....	15
Tabel 3. 5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks SPBE .....	23
Tabel 3. 6	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja .....	24
Tabel 3. 7	Capaian Kinerja Tahun 2023 Keterbukaan Informasi.....	26
Tabel 3. 8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Keterbukaan Informasi dengan Beberapa Tahun Terakhir.....	26
Tabel 3. 9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Keterbukaan Informasi dengan Target Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.....	27
Tabel 3. 10	Perbandingan Realisasi Kinerja Keterbukaan Informasi dengan Realisasi Level Nasional / Internasional.....	27
Tabel 3. 11	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keterbukaan Informasi .....	28
Tabel 3. 12	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja .....	29
Tabel 3. 13	Capaian Kinerja Tahun 2023 Penerapan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik.....	29

Tabel 3. 14	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Penerapan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik dengan Beberapa Tahun Terakhir .....	30
Tabel 3. 15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Penerapan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik dengan Target Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 .....	31
Tabel 3. 16	Perbandingan Realisasi Kinerja Keterbukaan Informasi dengan Realisasi Level Nasional / Internasional.....	31
Tabel 3. 17	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penerapan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik .....	32
Tabel 3. 18	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja .....	33
Tabel 3. 19	Capaian Kinerja Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit Tahun 2023 .....	34
Tabel 3. 20	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Penerapan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik dengan Beberapa Tahun Terakhir .....	34
Tabel 3. 21	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit dengan Target Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 .....	35
Tabel 3. 22	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit dengan Realisasi Level Nasional / Internasional.....	35
Tabel 3. 23	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit .....	36
Tabel 3. 24	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja .....	37
Tabel 3. 25	Capaian Kinerja Nilai AKIP Diskominfo Tahun 2023 .....	38
Tabel 3. 26	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Terakhir .....	38
Tabel 3. 27	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Komunikasi Informatika,	

	Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.....	39
Tabel 3. 28	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Diskominfo dengan Realisasi Level Nasional / Internasional.....	39
Tabel 3. 29	Monitoring dan Evaluasi TindakLanjut Atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022 atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.....	43
Tabel 3. 30	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Nilai AKIP Diskominfo.....	46
Tabel 3. 31	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja .....	46
Tabel 3. 32	Anggaran dan Realisasi Keuangan.....	48

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagaimana dalam Pasal 18 ayat 1 Perpres RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Kemudian secara teknis dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) dijelaskan didalam Permen PAN & Reformasi Birokrasi No. 53 th 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja & Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014, Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun yang dimaksud pengukuran kinerja merupakan suatu kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat keberhasilan/kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan / program / kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

### B. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023;

4. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2023.

### **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

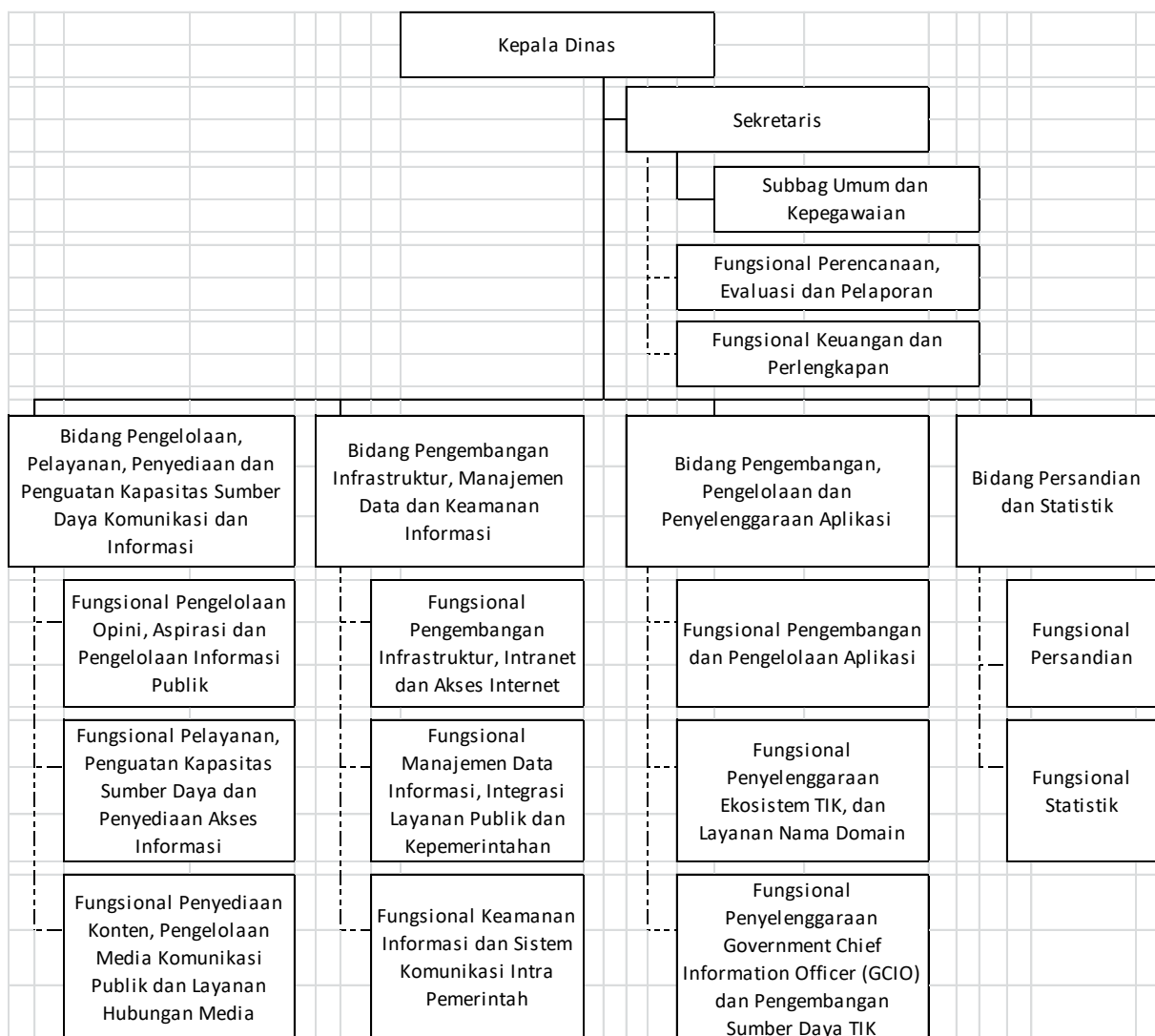
- 1) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan tugas membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik yang menjadi kewenangan daerah di.
- 2) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Fungsi :
  - a. Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan, dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data dan Keamanan Informasi, Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi, dan Bidang persandian dan Statistik;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan, dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data dan Keamanan Informasi, Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi, dan Bidang persandian dan Statistik;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan, dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data dan Keamanan Informasi, Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi, dan Bidang persandian dan Statistik;
  - d. Pelaksanaan Administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan, dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data dan Keamanan Informasi, Bidang Pengembangan,

- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi, dan Bidang persandian dan Statistik; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**D. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi



**E. Isu Strategis**

Isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas agar pencapaian tujuan lebih terstruktur, tepat, dan cepat.

- Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kota Smart City

- Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Terintegrasi
- Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang Berbasis Data
- Pelaksanaan dan Penerapan Sistem SPBE
- Keterbukaan Informasi Publik
- Information Technology for Society

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika laporan yang dianjurkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **a. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan visi Kabupaten Indragiri Hilir yaitu **Kejayaan Indragiri Hilir Yang Semakin Maju, Bermartabat dan Bermartabat** dan untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi yaitu :

- 1) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkeadilan hukum.
- 2) Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
- 3) Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.
- 4) Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan iman dan taqwa.
- 5) Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- 6) Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.
- 7) Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
- 8) Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir menjalankan Misi 1 : *“Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkeadilan hukum”*

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta telah diterbitkannya Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, maka Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan 2 tujuan dan 2 sasaran kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Matrix Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Visi : Kejayaan Indragiri Hilir Yang Semakin Maju, Bermarwah Dan Bermartabat			
Misi : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsive, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum			
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi DiskominfoPS
		Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja DiskominfoPS	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit
			Nilai AKIP DiskominfoPS
2	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	Nilai Keterbukaan Informasi
			Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik

## B. Rencana Kerja Tahun 2023

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik memiliki beberapa Program Utama dan Kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - i. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - i. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - i. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - ii. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - iii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - iv. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - v. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - vi. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - i. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - ii. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - i. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
    - ii. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
    - iii. Pelayanan Informasi Publik
    - iv. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
- a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - i. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
    - ii. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- iii. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - i. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - ii. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
  - iii. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
  - iv. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
  - v. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
  - vi. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
- 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
  - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
  - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - i. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

### **C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Adapun perjanjian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja DiskominfoPS	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	Nilai	24
		Nilai AKIP DiskominfoPS	Nilai	70
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	Nilai Keterbukaan Informasi	Nilai	97
		Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik	Persen	17.65

#### PROGRAM

#### ANGGARAN

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 7.920.600.693
2. Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 13.565.381.815
3. Aplikasi Informatika	Rp 1.816.792.000
4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 107.900.000
5. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 50.500.000

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan pengukuran kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

- **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan target berdasarkan sasaran strategis pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1 Capaian Tujuan Tahun 2023 Indeks SPBE

No.	Tujuan Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2	2,23	69,68

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, Tujuan strategis pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dengan indikator Indeks SPBE dengan target **3,2** dan realisasi **2,23 (Cukup)** dengan capaian **69,68%**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023 Pemkab Indragiri Hilir dapat dilihat sebagai berikut :

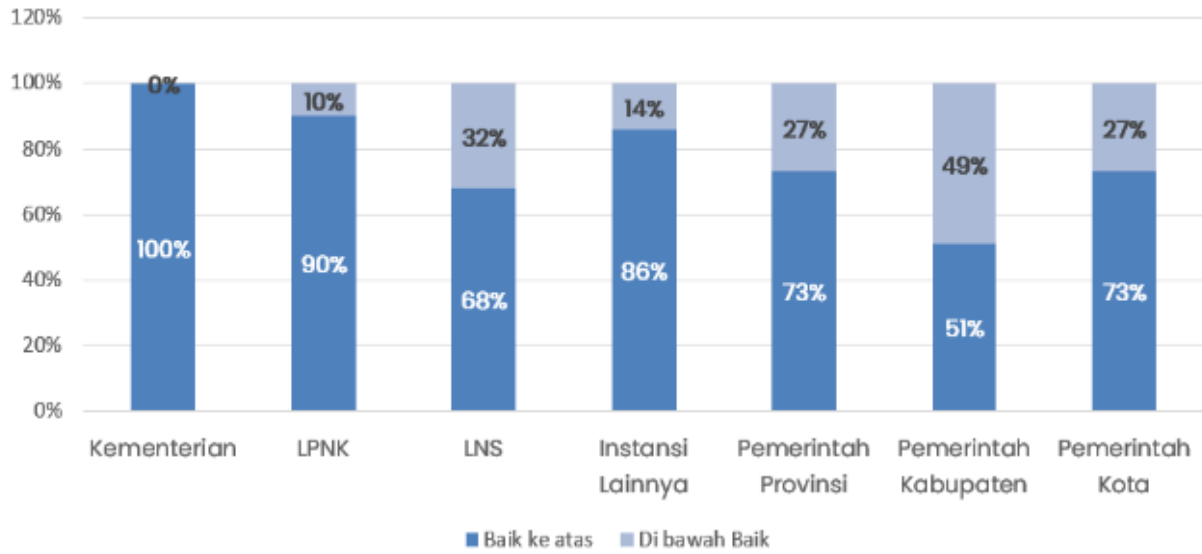
Gambar 3. 1 Hasil Evaluasi Indeks SPBE Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023																										
Domain dan Aspek Penilaian		Bobot		Predikat Indeks SPBE																						
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>		<b>13%</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 - 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 - &lt; 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 - &lt; 3,5</td> <td>Baik <sup>*)</sup></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 - &lt; 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>&lt; 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 - 5,0	Memuaskan	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 - < 3,5	Baik <sup>*)</sup>	4	1,8 - < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang				
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																								
1	4,2 - 5,0	Memuaskan																								
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik																								
3	2,6 - < 3,5	Baik <sup>*)</sup>																								
4	1,8 - < 2,6	Cukup																								
5	< 1,8	Kurang																								
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																								
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>		<b>25%</b>																								
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																								
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																								
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																								
<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>		<b>16,5%</b>																								
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																								
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																								
<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>		<b>45,5%</b>																								
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																								
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																								
				*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)																						

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
<b>SPBE</b>	<b>2,79</b>	<b>3,66</b>	<b>3,40</b>	<b>2,95</b>	<b>3,01</b>	<b>2,59</b>	<b>2,50</b>
<b>Domain Kebijakan</b>	<b>2,91</b>	<b>3,63</b>	<b>3,47</b>	<b>3,06</b>	<b>3,17</b>	<b>2,72</b>	<b>3,20</b>
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>2,27</b>	<b>3,42</b>	<b>3,02</b>	<b>2,66</b>	<b>2,56</b>	<b>2,01</b>	<b>2,54</b>
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
<b>Domain Manajemen</b>	<b>1,65</b>	<b>2,53</b>	<b>2,31</b>	<b>1,98</b>	<b>1,81</b>	<b>1,45</b>	<b>1,82</b>
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>3,45</b>	<b>4,21</b>	<b>3,99</b>	<b>3,43</b>	<b>3,64</b>	<b>3,28</b>	<b>3,67</b>
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

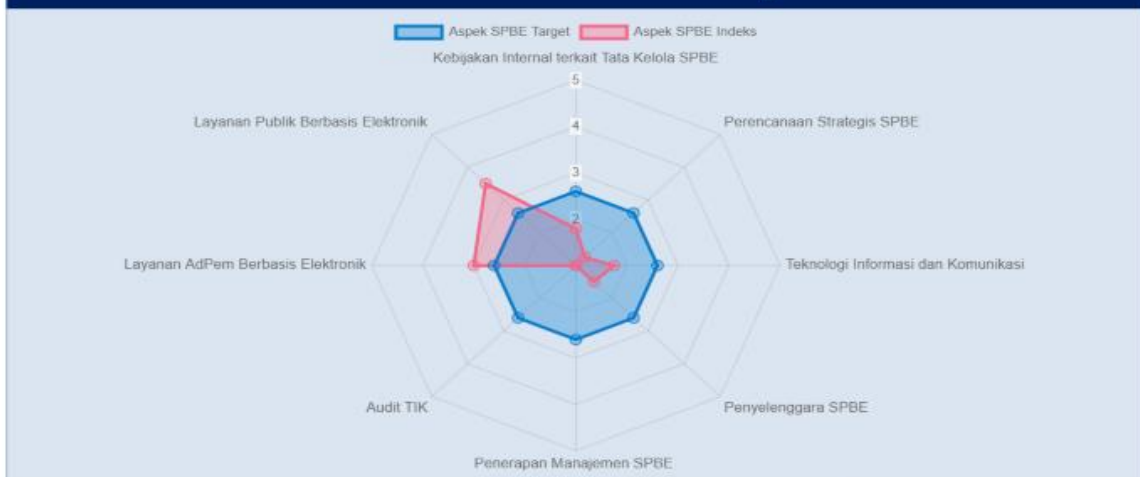
Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



**INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HILIR**

**2,23**  
(Cukup)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
<b>SPBE</b>	<b>2,23</b>
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	1,80
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	1,80
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	1,50
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	1,50
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
<b>Domain Layanan SPBE</b>	3,20
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,00
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,50

Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023 Pemkab Indragiri Hilir

- **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Terakhir Indeks SPBE

No.	Indikator Tujuan	2023		2022		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks SPBE	3,2	2,23	3	2,13	2,5	2,9

*Realisasi SPBE pada tahun 2021 menggunakan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Diskominfo Kab. Inhil*

Dari perbandingan tabel diatas dapat dilihat setiap tahun mengalami kenaikan terkecuali pada tahun 2021 yang dimana data menggunakan penilaian mandiri, pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan MenpanRB No. 108 tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan Indeks 2,13 dengan Prediket Cukup, dan pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 13

Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan Indeks 2,23 dengan Prediket Cukup.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Indeks SPBE dengan Target Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5 4/3*100	6	7 4/6*100
1.	Indeks SPBE	3,2	2,23	69,68	3,2	6,96

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional / Internasional (Benchmark Kinerja)**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan level Nasional / Internasional dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Level Nasional / Internasional Indeks SPBE

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Indeks Nasional
1.	Indeks SPBE	3,2	2,23	69,68%	2,79

Sumber : <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-umumkan-hasil-evaluasi-spbe-tahun-2023#:~:text=Evaluasi%20SPBE%20dilakukan%20terhadap%20621%20instansi%20pemerintah%2C%20dimana%20SPBE%20Tahun%202023%20adalah%20%2C79%20dengan%20predikat%20baik.>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengumumkan hasil evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023. Evaluasi SPBE dilakukan terhadap 621 instansi pemerintah, dimana sebanyak 24 pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperoleh prediket memuaskan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, diperoleh indeks SPBE Tahun

2023 adalah 2,79 dengan predikat baik. Pengumuman hasil evaluasi SPBE telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri PANRB No. 13/2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusinya**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023 Kabupaten Indragiri Hilir terdapat kekuatan, kelemahan serta rekomendasi untuk meningkatkan indeks SPBE untuk tahun mendatang, sebagai berikut :

- **Kekuatan dan Kelemahan**

- A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hilir adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE (Level 2), Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE (Level 2), Kebijakan Internal Layanan Pusat Data (Level 2), Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Level 3), Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan (Level 3) dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE (Level 2)

- **Kekuatan**

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hilir belum ditemukan adanya kebijakan yang menjadi kekuatan dalam mendorong implementasi SPBE.

- **Kelemahan**

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Indragiri Hilir masih memiliki beberapa kelemahan dalam kebijakan internal. Kebijakan internal yang saat ini hanya memenuhi level kematangan 1 adalah Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Audit TIK dan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Pengaturan pada Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, belum ditemukan secara jelas adanya pengaturan terkait dengan keempat indikator tersebut. Kebijakan internal yang saat ini hanya memenuhi level kematangan 2 adalah Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE. Pada Perda No. 3 Tahun 2021, keempat indikator ini

telah diatur akan tetapi belum mencakup keseluruhan pengaturan unsur/kelengkapan proses yang diharapkan. Pengaturan hanya mencakup sebagian aspek saja.

#### B. Perencanaan Strategis SPBE

Pemenuhan Aspek Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE di Pemerintah Kab. Indragiri Hilir adalah belum ada yang memenuhi kematangan minimal di Level 2.

- Kekuatan

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hilir belum ditemukan adanya pemenuhan indikator yang menjadi kekuatan dalam mendorong implementasi SPBE.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Indragiri Hilir masih memiliki kelemahan pada penerapan Perencanaan Startegis SPBE diantaranya pada indikator Rencana dan Anggaran SPBE (Level 1), Arsitektur SPBE (Level 1), Peta Rencana SPBE (Level 1), dan Inovasi Proses Bisnis SPBE (Level 2). Rencana dan Anggaran SPBE telah disertakan pada bukti dukung, akan tetapi belum ada bukti bahwa sebagian Anggaran tersebut telah dilakukan konsultasi kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat / Pemerintah Daerah, sehingga hanya memenuhi kematangan level 1. Terkait arsitektur dan peta rencana, telah tersedia Dokumen Masterplan SPBE Inhil 2022-2026, akan tetapi belum memenuhi kelengkapan unsur / referensi arsitektur dan muatan peta rencana secara lengkap sehingga hanya memenuhi kematangan level 2.

#### C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hilir adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE (Level 3) dan Layanan Jaringan Intra (Level 2)

- Kekuatan

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hilir belum ditemukan adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam mendorong implementasi SPBE.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Indragiri Hilir pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi masih memiliki kelemahan dalam Layanan Pusat Data (Level 1), Penggunaan Sistem Penghubung Layanan (Level 1) dan Layanan Jaringan Intra (Level 2). Belum ditemukan bukti dukung bahwa Layanan Pusat Data dan Sistem Penghubung Layanan telah digunakan oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hilir. Jaringan intra telah terbangun / diterapkan akan tetapi belum ditemukan bukti bahwa jaringan intra telah diterapkan pada seluruh unit kerja / perangkat daerah.

#### D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hilir adalah dengan adanya Tim Koordinasi SPBE yang memenuhi kematangan level 2.

- Kekuatan

Pada Aspek Penyelenggara SPBE oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hilir belum ditemukan adanya kebijakan yang menjadi kekuatan dalam mendorong implementasi SPBE.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Indragiri Hilir masih memiliki sejumlah kelemahan dalam Penyelenggara SPBE terkait dengan Kolaborasi Penerapan SPBE (Level 1) dan Tim Koordinasi SPBE (Level2). Capaian Level 1 pada Kolaborasi Penerapan SPBE disebabkan karena kegiatan kolaborasi antar unit kerja dilaksanakan tanpa perencanaan / sewaktu-waktu. Tim Koordinasi SPBE ditetapkan di Level 2, karena tugas / program kerja Tim Koordinasi SPBE telah dilaksanakan sesuai perencanaan akan tetapi belum dilaksanakan seluruhnya.

#### E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hilir belum ada yang memenuhi kematangan minimal di level 2.

- Kekuatan

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hilir belum ditemukan adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam mendorong implementasi SPBE.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Indragiri Hilir masih memiliki sejumlah kelemahan pada penerapan Manajemen SPBE terkait Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan yang menunjukkan kegiatan manajemen telah dilakukan sesuai dengan perencanaan. Dengan demikian, seluruhnya hanya memenuhi kematangan dengan capaian level 1. Kelemahan lainnya ditemukan pada pelaksanaan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi yang telah direncanakan akan tetapi belum mengacu kepada pedoman yang berlaku sehingga kematangannya ditetapkan pada level 2.

#### F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK di Pemerintah Kab. Indragiri Hilir, belum ada yang memenuhi capaian kematangan level 2 ke atas.

- Kekuatan

Pada Aspek Audit TIK oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hilir belum ditemukan adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam mendorong implementasi SPBE.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Indragiri Hilir masih memiliki sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan aspek Audit TIK diantaranya terkait Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung yang menunjukkan bahwa kegiatan Audit TIK telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Dengan demikian kematangannya hanya memenuhi capaian pada level 1.

#### G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hilir adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa,

Layanan Kepegawaian, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai. Dari keseluruhan indikator tersebut hanya Layanan Pengawasan Internal Pemerintah dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang kematangannya berada di Level 2 dan sisanya telah memenuhi kematangan Level 4.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian dan Layanan Kinerja Pegawai yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Indragiri Hilir. Semua layanan sudah memenuhi aspek teknikinformatif, interaksi, transaksi dan kolaborasi sehingga dapat mendukung penerapan SPBE di Pemerintah Kab. Indragiri Hilir secara maksimal.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Indragiri Hilir masih memiliki beberapa kelemahan dalam Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait dengan Layanan Kearsipan Dinamis (Level 1), Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Level 1), Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (Level 2) dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (Level 2). Layanan Kearsipan Dinamis dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ditetapkan berada di Level 1 karena kedua layanan ini hanya menyediakan fitur informasi saja dan belum menyediakan fitur interaksi. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi ditetapkan nilai kematangannya di Level 2 karena hanya menyediakan layanan yang bersifat informasi dan interaksi saja dan belum menyediakan fitur transaksi, validasi, persetujuan dan analitik data.

#### H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik seluruhnya sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hilir. Layanan tersebut terdiri dari Layanan Pengaduan Pelayanan Publik (Level4), Layanan Data Terbuka (Level 2), Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum /JDIH (Level 2), Layanan Publik Sektor 1 untuk Rumah sakit terintegrasi dengan

mobile JKN (Level 4), Layanan Publik Sektor 2 untuk Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (Level 5) dan Layanan Publik Sektor 3 untuk Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu (Level 4).

– Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hilir terdapat Layanan, Layanan Publik Sektor 2 (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Publik Sektor 1 (Rumah sakit integrasi mobile JKN) dan Layanan Publik Sektor 3 (Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu). Layanan Publik Sektor 2 merupakan salah satu layanan dalam RB Tematik, sehingga memenuhi Kematangan Level 5, dan ketiga layanan lainnya memenuhi Kematangan Level 4.

– Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Indragiri Hilir masih memiliki sejumlah kelemahan dalam Layanan Publik Berbasis Elektronik yang mengatur terkait Layanan Data Terbuka dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kedua layanan ini hanya menyediakan layanan yang bersifat informasi dan interaksi saja dan belum menyediakan fitur transaksi, validasi, persetujuan dan analitik data, sehingga hanya mencapai kematangan level 2.

• **Rekomendasi**

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Indragiri Hilir. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kab. Indragiri Hilir, sudah dapat menggambarkan predikat cukup dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Indragiri Hilir adalah pada penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya penerapan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Publik Sektor 2 (Perijinan) yang telah memenuhi kondisi terintegrasi.

Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi pengaduan pelayanan publik dan perijinan.

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Indragiri Hilir masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Penerapan manajemen SPBE dan Audit TIK, Perencanaan Strategis SPBE dan Penyelenggara SPBE. Terkait Aspek Penerapan Manajemen SPBE, semuanya masih dilakukan tanpa pedoman perencanaan dan dilakukan sewaktu-waktu. Demikian juga untuk aspek Audit TIK yang dilakukan tanpa melalui perencanaan di tahap awal sehingga tidak maksimal. Pada aspek Perencanaan Strategis SPBE, belum tersedia dokumen arsitektur dan peta rencana yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada regulasi yang berlaku. Terkait dengan Penyelenggara SPBE, Tim Koordinasi SPBE di tingkat Pemerintah Kab. Indragiri Hilir masih berjalan tanpa adanya program kerja yang terencana. Kolaborasi Penerapan SPBE juga masih dilakukan tanpa perencanaan. Hal ini menyebabkan Penyelenggara SPBE, Penerapan manajemen SPBE dan Audit TIK yang dilaksanakan tidak efektif dan optimal dalam mendukung penyelenggaraan SPBE secara keseluruhan.

Apresiasi diberikan terhadap penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kab. Indragiri Hilir terkait dengan banyaknya pemanfaatan Aplikasi Umum Berbagi Pakai untuk Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik. Hal ini dapat meningkatkan Tingkat Kematangan, perbaikan kualitas layanan baik internal maupun Masyarakat, dan efisiensi anggaran. Pemakaian berbagai aplikasi umum/berbagi pakai adalah pilihan terbaik dalam mewujudkan layanan secara cepat dan murah. Untuk memperbaiki tingkat kematangan dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kab. Indragiri Hilir, diperlukan upaya-upaya perbaikan yang sifatnya wajib dan mendesak untuk direncanakan dan dilaksanakan.

Pada Aspek Kebijakan internal diperlukan review untuk memastikan pemenuhan kelengkapan dalam pengaturan baik terkait kelengkapan unsur maupun cakupan organisasi. Pemerintah Kab. Indragiri Hilir harus segera menyusun dokumen arsitektur dan Peta Rencana SPBE sesuai dengan ketentuan terbaru. Setelah dokumen ini disusun, hendaknya semua aspek penerapan SPBE mengacu kepada dokumen Arsitektur dan Peta Rencana sehingga akan terjadi kolaborasi dalam penyelenggaraan SPBE. Aspek Layanan yang telah berjalan dengan baik, hendaknya mulai ditingkatkan dengan pemakaian sistem berbagi pakai maupun melakukan peningkatan kapasitas teknis aplikasi mulai dari pengembangan fitur transaksi, validasi, proses review dan penyempurnaan terhadap layanan yang telah ada sehingga tingkat kematangannya akan semakin maksimal. Aspek lainnya yang

cukup penting adalah melakukan berbagai upaya terkait penerapan manajemen perubahan agar penyelenggarannya SPBE di Pemerintah Kab. Indragiri Hilir dapat dilakukan secara lebih bersama-sama dan melibatkan sinergi dari seluruh komponen perangkat daerah di bawah koordinasi Tim Koordinasi SPBE.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk menghitung efisiensi sumber daya, perlu diuraikan target indikator kinerja yang mencapai 100% atau lebih, kemudian dihitung penyerapan anggaran atas program yang mendukung indikator kinerja sasaran tersebut.

Berikut tabel analisis efisiensi sumber daya atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 :

Tabel 3. 5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks SPBE

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi	Efisiensi
1.	Indeks SPBE	3,2	2,23	23.461.174.508	21.984.847.959	6,29

Dari tabel diatas dapat dilihat dari pagu sesuai DPA APBD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil total efisiensi untuk Indeks SPBE sebesar 6,29 persen.

- **Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2023 hampir seluruhnya mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
3. Pengelolaan Aplikasi informatika
4. Penyelenggaraan statistik sektoral
5. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Adapun kontribusi Program/Kegiatan atas pencapaian kinerja dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja diskominfo	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi
	- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	- Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar - Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar
	- Administrasi keuangan perangkat daerah	- Persentase pelaporan aset yang disusun sesuai standar - Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar
	- Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	- Persentase aset dan barang milik daerah (bmd) pada pengelola yang terpelihara
	- Administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Persentase aparatur yang berkinerja baik - Persentase aparatur yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi
	- Administrasi umum perangkat daerah	- Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik
	- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor
	- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	- Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik
Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan informasi pelayanan publik terintegrasi	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi
	- Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	- Persentase informasi dan komunikasi publik yang tersampaikan

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
	kabupaten/kota	
	Pengelolaan aplikasi informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase jumlah aplikasi PD yang jaringan aplikasinya di awasi oleh dinas kominfo pers kab.inhil</li> <li>- Persentase terpenuhinya sistem pelayanan informasi berbasis tik</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cakupan jumlah sub domain lingkup pemda yang dikelola</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase sistem informasi perangkat daerah yang telah terintegrasi</li> </ul>
	Penyelenggaraan statistik sektoral	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase dokumen data statistik sektoral daerah yg tepat waktu</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase data statistik sektoral yang tersedia</li> </ul>
	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase PD yang menggunakan sistem persandian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian</li> </ul>

### NILAI KETERBUKAAN INFORMASI

Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

- **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan target berdasarkan sasaran strategis pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Tahun 2023 Keterbukaan Informasi

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Keterbukaan Informasi	97	95,55	98,5 %

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, Sasaran strategis pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dengan indikator Nilai Keterbukaan Informasi dengan target **97** dan realisasi **95,55 (Informatif)** dengan capaian **98,5%**.

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau No. 001/KEP/KIP-R/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 3. 2 Hasil Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau

### 1. PPID UTAMA KABUPATEN / KOTA

NO	BADAN PUBLIK	NILAI	KETERANGAN
1	Kabupaten Rokan Hulu	97,15	Informatif
2	Kabupaten Indragiri Hilir	95,55	Informatif
3	Kabupaten Bengkalis	94,30	Informatif
4	Kabupaten Rokan Hilir	91,98	Informatif
5	Kabupaten Kampar	91,65	Informatif
6	Kota Pekanbaru	89,33	Menuju Informatif
7	Kabupaten Indragiri Hulu	84,28	Menuju Informatif
8	Kabupaten Kepulauan Meranti	74,30	Cukup Informatif
9	Kota Dumai	70,13	Cukup Informatif
10	Kabupaten Kuantan Singingi	47,98	Kurang Informatif
11	Kabupaten Pelalawan	40,90	Kurang Informatif
12	Kabupaten Siak	40,70	Kurang Informatif

- **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Keterbukaan Informasi dengan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Sasaran	2023		2022		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai Keterbukaan Informasi	97	95,55	97	94,75	80	97

Dari perbandingan tabel diatas dapat dilihat ada penurunan yang dimana terdapat beberapa kendala, namun pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau No. 001/KEP/KIP-R/XI/2023 kembali naik dan kedepannya diharapkan kembali naik dengan tetap dikategori Informatif.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Keterbukaan Informasi dengan Target Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5 $\frac{4}{3} \times 100$	6	7 $\frac{4}{6} \times 100$
1.	Nilai Keterbukaan Informasi	97	95,55	98,5	97	101,5

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional / Internasional (Benchmark Kinerja)**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan level Nasional / Internasional dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Keterbukaan Informasi dengan Realisasi Level Nasional / Internasional

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Nilai Nasional
1.	Nilai Keterbukaan Informasi	97	95,55	98,5%	75,40

Sumber : <https://www.antaraneews.com/berita/3589332/indeks-keterbukaan-informasi-publik-2023-capai-7540-poin>

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusinya**

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau No. 001/KEP/KIP-R/XI/2023 ada beberapa catatan kenapa realisasi tidak mencapai angka target yang diharapkan sebagai berikut :

- Tingkat kepatuhan PPID pelaksana dalam menginformasikan laporan keuangan dan catatan laporan keuangan masih rendah.

Solusi untuk menindaklanjuti dari catatan tersebut :

- Melakukan kegiatan FGD terkait PPID mengenai Keterbukaan Informasi Publik sehingga setiap badan publik yang menggunakan anggaran negara wajib menyampaikan laporan keuangan dan dokumen lainnya.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk menghitung efisiensi sumber daya, perlu diuraikan target indikator kinerja yang mencapai 100% atau lebih, kemudian dihitung penyerapan anggaran atas program yang mendukung indikator kinerja sasaran tersebut.

Berikut tabel analisis efisiensi sumber daya atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 :

Tabel 3. 11 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keterbukaan Informasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi	Efisiensi
1.	Nilai Keterbukaan Informasi	97	95,55	13.565.381.815	13.445.345.839	0,88

Dari tabel diatas dapat dilihat dari pagu sesuai DPA APBD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil total efisiensi untuk Nilai Keterbukaan Informasi sebesar 0,88 persen.

- **Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2023 hampir seluruhnya mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Adapun kontribusi Program/Kegiatan atas pencapaian kinerja dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 12 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan informasi pelayanan publik terintegrasi	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi
	- Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	- Persentase informasi dan komunikasi publik yang tersampaikan

### **CAKUPAN PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SECARA ELEKTRONIK**

Proses pengolahan data yang semakin meningkat dan dalam jumlah besar, bukan perkara mudah untuk ditangani. Belum lagi perlunya keamanan dan jaminan kondisi dari dokumen atau arsip tersebut. Itulah sebabnya e-Office hadir sebagai solusi permasalahan tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan organisasi membutuhkan aplikasi e-Office antara lain :

- Ingin Mempercepat Proses Penyampaian Informasi.
- Dapat Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Penyampaian Informasi.
- Dapat Menghemat Anggaran Belanja Kertas
- Memudahkan Dalam Pencarian Informasi

Aplikasi e-Office tersebut diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk kedepannya, dan pada tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir diaplikasikan ke beberapa Perangkat Daerah dan diharapkan kedepannya seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir akan menerapkan aplikasi e-Office sebagai sistem surat menyurat.

#### **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan target berdasarkan sasaran strategis pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Tahun 2023 Penerapan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan	17,65%	14.7%	83.3%

	Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik			
--	---	--	--	--

Berdasarkan tabel 3.13 diatas, Sasaran strategis pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dengan indikator Cakupan Pemerintah Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik dengan target **17,65%** dan realisasi **14,7%** dengan capaian **83,3%**.

Pada tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hilir yang menerapkan administrasi pemerintahan secara elektronik ada lima (5) Perangkat Daerah dari total tiga puluh empat (34) Perangkat Daerah yaitu Badan Perencanaan Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, dan Sekretariat Daerah.

- **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Penerapan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik dengan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Sasaran	2023		2022		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik	17,65%	14.7%	11,26	12,5	2,94	2,94

Dari perbandingan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan yang dimana perangkat daerah telah menerapkan aplikasi administrasi (e-Office) dalam melakukan administrasi secara elektronik.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Penerapan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik dengan Target Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5 $4/3 \times 100$	6	7 $4/6 \times 100$
1.	Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik	17,65	14.7	83.3	17,65	83,28

- Perbandingan Realisasi Kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional / Internasional (Benchmark Kinerja)**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan level Nasional / Internasional dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Keterbukaan Informasi dengan Realisasi Level Nasional / Internasional

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Nilai Nasional
1.	Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik	17,65	14.7	83.3	n/a

- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusinya**

Dari hasil analisis berjalan sampai dengan akhir tahun 2023, ada beberapa penyebab pendorong dan penghambat yaitu :

- Pendorong
  - a. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas di organisasi maupun instansi.

- b. Mempermudah proses administrasi perkantoran, proses surat-menyerurat, pengarsipan dokumen, dan proses disposisi.
  - c. Mempertimbangan aspek keamanan data, perlindungan terhadap data sensitif dan rahasia.
  - d. Mengurangi biaya operasional, data dapat diakses dengan lebih mudah, serta dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi.
  - e. mengubah alur kerja yang tradisional menjadi lebih sederhana dan efisien.
- Penghambat
    - a. konektivitas dan infrastruktur internet
    - b. keterbatasan akses internet yang dapat menghambat penggunaan e-Office secara maksimal
    - c. dukungan SDM yang masih minim

Dari beberapa faktor diatas terdapat alternatif solusi yang dapat diterapkan yakni Sosialisasi dan Penerapan kepada OPD kenapa pentingnya penggunaan aplikasi e-Office ini untuk memudahkan dan kelancaran dalam hal administrasi.

#### • Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk menghitung efisiensi sumber daya, perlu diuraikan target indikator kinerja yang mencapai 100% atau lebih, kemudian dihitung penyerapan anggaran atas program yang mendukung indikator kinerja sasaran tersebut.

Berikut tabel analisis efisiensi sumber daya atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 :

Tabel 3. 17 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penerapan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi	Efisiensi
1.	Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik	17,65	14.7	1.816.792.000	1.680.554.775	7,5

Dari tabel diatas dapat dilihat dari pagu sesuai DPA APBD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil total efisiensi untuk Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik sebesar 7,5 persen.

• **Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2023 hampir seluruhnya mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Pengelolaan aplikasi informatika

Adapun kontribusi Program/Kegiatan atas pencapaian kinerja dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 18 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan informasi pelayanan publik terintegrasi	Pengelolaan aplikasi informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase jumlah aplikasi PD yang jaringan aplikasinya di awasi oleh dinas kominfo pers kab.inhil</li> <li>- Persentase terpenuhinya sistem pelayanan informasi berbasis tik</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cakupan jumlah sub domain lingkup pemda yang dikelola</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase sistem informasi perangkat daerah yang telah terintegrasi</li> </ul>

**NILAI EVALUASI RB ATAS KOMPONEN PENGUNGKIT**

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

- **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan target berdasarkan sasaran strategis pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 19 Capaian Kinerja Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	24	n/a	n/a

Berdasarkan tabel 3.19 diatas, Sasaran strategis pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dengan indikator Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit dengan target **24** dan realisasi **n/a** dikarenakan ada perubahan Permen PANRB terkait evaluator RB, maka tahun 2023 tidak dilakukan evaluasi RB pada perangkat daerah.

- **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Penerapan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik dengan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Sasaran	2023		2022		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	24	n/a	23	n/a	n/a	n/a

Berdasarkan tabel 3.20 diatas, Sasaran strategis pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dengan indikator Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit tidak ada realisasi yang tercapai dikarenakan ada perubahan Permen PANRB terkait evaluator RB, maka tahun 2023

tidak dilakukan evaluasi RB pada perangkat daerah, juga pada tahun 2022 Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik belum ada mendapatkan lembar hasil evaluasi atas Reformasi Birokrasi dari Inspektorat Daerah akan tetapi telah melakukan Penilaian Mandiri atas Evaluasi RB tersebut dan didapatkan hasil 19,39, dan pada tahun 2021 Indikator tersebut belum ada/belum dimasukkan kedalam Renstra dan indikator tersebut telah masuk pada Perubahan Renstra pada tahun 2022.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit dengan Target Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5 $\frac{4}{3} \times 100$	6	7 $\frac{4}{6} \times 100$
1.	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	24	n/a	n/a	24	n/a

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional / Internasional (Benchmark Kinerja)**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan level Nasional / Internasional dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit dengan Realisasi Level Nasional / Internasional

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Nilai Nasional
1.	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	24	n/a	n/a	n/a

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusinya**

Dikarenakan tidak adanya evaluasi maka analisis keberhasilan/kegagalan dan solusinya tidak dapat dilakukan.

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk menghitung efisiensi sumber daya, perlu diuraikan target indikator kinerja yang mencapai 100% atau lebih, kemudian dihitung penyerapan anggaran atas program yang mendukung indikator kinerja sasaran tersebut.

Berikut tabel analisis efisiensi sumber daya atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 :

Tabel 3. 23 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi	Efisiensi
1.	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	24	n/a	7.920.600.693	6.707.333.905	15,32

Dari tabel diatas dapat dilihat dari pagu sesuai DPA APBD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil total efisiensi untuk Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit sebesar 15,32 persen.

- **Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2023 hampir seluruhnya mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Adapun kontribusi Program/Kegiatan atas pencapaian kinerja dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 24 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja diskominfo	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi
	- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	- Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar - Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar
	- Administrasi keuangan perangkat daerah	- Persentase pelaporan aset yang disusun sesuai standar - Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar
	- Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	- Persentase aset dan barang milik daerah (bmd) pada pengelola yang terpelihara
	- Administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Persentase aparatur yang berkinerja baik - Persentase aparatur yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi
	- Administrasi umum perangkat daerah	- Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik
	- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor
	- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	- Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik

### NILAI AKIP DISKOMINFO

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya

setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir diwajibkan menilai Akuntabilitas Kinerja sesuai peraturan yang berlaku dan demikian dengan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik juga menilai Akuntabilitas Kinerja setiap tahun.

- **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan target berdasarkan sasaran strategis pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 25 Capaian Kinerja Nilai AKIP Diskominfops Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai AKIP Diskominfops	70	n/a	n/a

Berdasarkan tabel 3.25 diatas, sasaran strategis pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir salah satunya yaitu Nilai AKIP Diskominfops, Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir belum mendapatkan hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah dan berkemungkinan akan mendapatkan hasil penilaian pada bulan maret 2023.

- **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Sasaran	2023		2022		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai AKIP Diskominfops	70	n/a	62	73,65	B	64,04

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5 4/3*100	6	7 4/6*100
1.	Nilai AKIP Diskominfo	70	n/a	n/a	70	n/a

- **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional / Internasional (Benchmark Kinerja)**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan level Nasional / Internasional dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Diskominfo dengan Realisasi Level Nasional / Internasional

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Nilai Nasional
1.	Nilai AKIP Diskominfo	70	n/a	n/a	64,52

Sumber : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hilir No.B/207/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusinya**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP tahun 2022 pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, hasil evaluasi dilakukan dengan metode desk evaluation menggunakan data awal *self assesment* (SA) Unit Kerja. Dari hasil tersebut dijumpai kelemahan-kelemahan di setiap sektor evaluasi sakip antara lain :

- Evaluasi perencanaan kinerja
  - a) Indikator kinerja utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, belum tertuang secara berkelanjutan (sustainable- tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis).
  - b) Penjabaran kendala atas kinerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya di LKjIP belum sepenuhnya menjadi langkah

- perbaikan/penyempurnaan yang tertuang di dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil evaluasi SAKIP sebelumnya.
- c) RKPD/Renja belum sepenuhnya memuat informasi perbaikan/penyempurnaan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik dari target yang direncanakan dalam RPJMD/Renstra seperti inovasi, penambahan program kinerja, atau peningkatan target kinerja.
- Evaluasi pengukuran kinerja
- a) Pada LKjIP belum sepenuhnya menyajikan informasi terhadap realisasi kinerja dan anggaran sebagai berikut:
    - a. Upaya efisiensi jika realisasi kinerja  $\geq 100\%$  dan anggaran  $\leq 100\%$ ;
    - b. Faktor pendorong jika realisasi kinerja 100% dan anggaran 100%;
    - c. Faktor penghambat jika realisasi  $< 100\%$ .
  - b) Pada penutup LKjIP belum sepenuhnya memuat rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya/evaluasi berjalan.
- Evaluasi pelaporan kinerja
- a) Belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), yaitu LKjIP belum memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja OPD/Pemda dengan data realisasi capaian nasional (contoh rata-rata capaian Pemerintah Indonesia melalui data Kementerian, Badan Pusat Statistik, Lembaga Negara/Swasta Independen, antar Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi) dan data realisasi capaian internasional (contoh rata-rata capaian Lembaga Internasional Independen seperti PBB, ASEANstats, IMF, World Bank).
  - b) Setiap unit kerja/bidang belum sepenuhnya melaksanakan /membuat laporan pengukuran kinerja triwulan, dan telah dilakukan rekapitulasi pada Monev.
  - c) Pelaksanaan monev belum sepenuhnya dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan pernah mengikuti sosialisasi/diklat mengenai pengukuran dan pengumpulan realisasi data kinerja. Pegawai eselon 2

dan 3 terlibat dalam pelaksanaan Monev dengan bukti tanda tangan pada Monev.

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Hal yang perlu mendapat perhatian atas akuntabilitas kinerja internal adalah belum seluruh pegawai memiliki kompetensi terkait implementasi SAKIP sesuai aturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021.

Terhadap Hasil Evaluasi AKIP tersebut, ada beberapa rekomendasi agar :

- 1) Menyusun dokumen IKU yang menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable-tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis yaitu selama 1 periode RPJMD atau Renstra (5 tahun).
- 2) Memuat informasi perbaikan/penyempurnaan atas kinerja atau target yang tidak tercapai dari hasil evaluasi SAKIP sebelumnya pada dokumen perencanaan kinerja.
- 3) Memuat informasi perbaikan/penyempurnaan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik dari target yang direncanakan dalam RPJMD/Renstra seperti inovasi, penambahan program kinerja, atau peningkatan target kinerja.
- 4) Pada LKjIP menyajikan informasi terhadapl realisasi kinerja dan anggaran meliputi upaya efisiensi faktor pendorong dan faktor hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 5) Pada penutup LKjIP memuat rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya/evaluasi berjalan.
- 6) Dokumen laporan kinerja atau LKjIP memuat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- 7) Setiap unit kerja/bidang melaksanakan/memuat laporan pengukuran kienrja triwulan.
- 8) Melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui usulan diklat, bimbingan teknis, seminar baik daring maupun luring terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021.

Dan berdasarkan kertas kerja monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi LHE SAKIP Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik No.022/INSP-LHE/III/2023 tanggal 31 maret 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 29 Monitoring dan Evaluasi TindakLanjut Atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022 atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Evidance yang diharapkan
1	<p>Evaluasi perencanaan kinerja</p> <p>1) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, belum tertuang secara berkelanjutan (sustainable- tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).</p> <p>2) Penjabaran kendala atas kinerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya di LKjIP belum sepenuhnya menjadi langkah perbaikan / penyempurnaan yang tertuang di Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil evaluasi SAKIP sebelumnya.</p> <p>3) RKPD/Renja belum sepenuhnya memuat informasi perbaikan / penyempurnaan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik dari target yang direncanakan dalam RPJMD / Renstra seperti inovasi, penambahan program kinerja, atau peningkatan target kinerja.</p>	<p>1) Agar menyusun dokumen IKU yang menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable-tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis yaitu selama 1 periode RPJMD atau Renstra (5 tahun)</p> <p>2) Agar memuat informasi perbaikan/penyempurnaan atas kinerja atau target yang tidak tercapai dari hasil evaluasi SAKIP sebelumnya pada Dokumen Perencanaan Kinerja</p> <p>3) Memuat informasi perbaikan/penyempurnaan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik dari target yang direncanakan dalam RPJMD/Renstra seperti inovasi, penambahan program kinerja, atau peningkatan target kinerja,</p>	<p>1) SK IKU terbaru tahun 2022-2023</p>
2	<p>Evaluasi Pengukuran Kinerja</p> <p>1) Pada LKjIP belum sepenuhnya menyajikan informasi terhadap realisasi kinerja dan anggaran sebagai berikut :</p> <p>a. Upaya efisiensi jika realisasi kinerja <math>\geq 100\%</math> dan</p>	<p>1) Agar pada LKjIP menyajikan informasi terhadap realisasi kinerja dan anggaran meliputi upaya efisiensi, faktor pendorong dan</p>	<p>1) Telah disajikan informasi terhadap realisasi kinerja dan anggaran meliputi upaya</p>

No	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Evidance yang diharapkan
	<p>anggaran ≤100% ;</p> <p>b. Faktor pendorong jika realisasi kinerja 100% dan anggaran 100% ;</p> <p>c. Faktor hambatan jika realisasi kinerja &lt;100%.</p> <p>2) Pada penutup LKjIP belum sepenuhnya memuat rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya / evaluasi berjalan</p>	<p>faktor hambatan dalam pelaksanaan kegiatan</p> <p>2) Agar pada penutup LKjIP memuat rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya/evaluasi berjalan</p>	<p>efisiensi, faktor pendorong dan faktor hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada LKjIP 2023</p> <p>2) pada penutup LKjIP 2023 telah memuat rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya/evaluasi berjalan</p>
3	<p>Evaluasi Pelaporan Kinerja</p> <p>1) belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), yaitu LKjIP belum memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja OPD/Pemda dengan data realisasi capaian nasional (contoh rata-rata capaian Pemerintah Indonesia melalui data Kementerian, Badan Pusat Statistik, Lembaga Negara/Swasta Independen, Antar Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi) dan data realisasi capaian internasional (contoh rata-rata capaian Lembaga Internasional Independen seperti PBB, ASEANstats, IMF,</p>	<p>1) Agar Dokumen Laporan Kinerja atau LKjIP memuat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)</p> <p>2) Setiap unit kerja/ bidang melaksanakan/membuat Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan</p>	<p>1) Pada Dokumen Laporan Kinerja atau LKjIP 2023 telah memuat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)</p> <p>2) Setiap unit kerja / bidang telah melaksanakan / membuat Laporan</p>

No	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Evidance yang diharapkan
	<p>World Bank).</p> <p>2) Setiap unit kerja / bidang belum sepenuhnya melaksanakan / membuat Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan, dan telah dilakukan rekapitulasi pada Monev.</p> <p>3) Pelaksana monev belum sepenuhnya dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan pernah mengikuti sosialisasi / diklat mengenai pengukuran dan pengumpulan realisasi data kinerja. Pegawai Eselon 2 dan 3 terlibat dalam pelaksanaan Monev dengan bukti tanda tangan pada Monev</p>		<p>Pengukuran Kinerja Triwulan</p>
4	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p> <p>1) belum seluruh pegawai memiliki kompetensi terkait implementasi SAKIP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021</p>	<p>1) Melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui usulan Diklat, Bimbingan Teknis, Seminar baik daring maupun luring terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021</p>	<p>1) Telah melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui usulan Diklat, Bimbingan Teknis, Seminar baik daring maupun luring terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021</p>

- **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk menghitung efisiensi sumber daya, perlu diuraikan target indikator kinerja yang mencapai 100% atau lebih, kemudian dihitung penyerapan anggaran atas program yang mendukung indikator kinerja sasaran tersebut.

Berikut tabel analisis efisiensi sumber daya atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 :

Tabel 3. 30 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Nilai AKIP Diskominfo

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi	Efisiensi
1.	Nilai AKIP Diskominfo	70	n/a	7.920.600.693	6.707.333.905	15,32

Dari tabel diatas dapat dilihat dari pagu sesuai DPA APBD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil total efisiensi untuk Nilai AKIP Diskominfo sebesar 15,32 persen.

- **Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2023 hampir seluruhnya mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Adapun kontribusi Program/Kegiatan atas pencapaian kinerja dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 31 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja diskominfo	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi
	- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	- Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar - Persentase perencanaan kinerja yang disusun

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
		sesuai standar
	- Administrasi keuangan perangkat daerah	- Persentase pelaporan aset yang disusun sesuai standar - Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar
	- Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	- Persentase aset dan barang milik daerah (bmd) pada pengelola yang terpelihara
	- Administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Persentase aparatur yang berkinerja baik - Persentase aparatur yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi
	- Administrasi umum perangkat daerah	- Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik
	- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor
	- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	- Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik

## B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DPPA Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun Anggaran 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebesar **Rp23.461.174.508**, Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Pendanaan Desember 2023 sebesar **Rp21.984.847.959** dengan Realisasi Keuangan sebesar **93,71%** dengan rincian belanja sebagai berikut :

Tabel 3. 32 Anggaran dan Realisasi Keuangan

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	<b>4. PENDAPATAN DAERAH</b>			
	<b>4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.687.220.000</b>	<b>112,48</b>
	4.1.02 Retribusi Daerah	1.500.000.000	1.687.220.000	112,48
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.687.220.000</b>	<b>112,48</b>
2	<b>5. BELANJA DAERAH</b>			
	<b>5.1 BELANJA OPERASI</b>	<b>22.175.662.508</b>	<b>20.745.235.679</b>	<b>93,55</b>
	5.1.01 Belanja Pegawai	4.314.069.495	3.159.208.250	81,58
	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	17.711.593.013	17.076.027.429	96,41
	5.1.05 Belanja Hibah	150.000.000	150.000.000	100
	<b>5.2 BELANJA MODAL</b>	<b>1.285.512.000</b>	<b>1.239.612.280</b>	<b>96,43</b>
	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	760.100.000	733.585.780	96,51
	5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	184.412.000	165.116.500	89,54
	5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	341.000.000	340.910.000	99,97
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>23.461.174.508</b>	<b>21.984.847.959</b>	<b>93,71</b>

Sumber Data : LRA Diskominfo Kab. Inhil tahun 2023

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1) Capaian Kinerja

Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal maka diperlukan Sumber Daya Manusia, Sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Berikut capaian sasaran strategis dari empat (4) indikator kinerja yang dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- a. Nilai evaluasi RB atas komponen pengungkit dari target 24 realisasi tidak ada karena ada perubahan Permen PANRB terkait evaluator RB, maka tahun 2023 tidak dilakukan evaluasi RB pada perangkat daerah.
- b. Nilai AKIP diskominfops dari target 70 dengan realisasi belum ada, berkemungkinan pada bulan maret tahun 2024 akan mendapatkan nilai AKIP.
- c. Nilai keterbukaan informasi dari target 97 dengan realisasi 95,55 dengan capaian sebesar 98,5%.
- d. Cakupan perangkat daerah yang menerapkan administrasi pemerintahan secara elektronik dari target 17,65 dengan realisasi 14,7 dengan capaian sebesar 83,3%.

#### 2) Permasalahan

Sebagian besar capaian kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir belum mencapai 100 %, hal ini di pengaruhi oleh :

- a. Masih ada aspek kebijakan SPBE yang belum mencapai level kematangan minimal.

- b. Tingkat kepatuhan PPID pelaksana dalam menginformasikan laporan keuangan dan catatan laporan keuangan masih rendah.
- c. Keterbatasan akses internet, konektivitas dan infrastruktur internet serta dukungan SDM yang masih minim.
- d. Masih adanya kelemahan di tiap sektor evaluasi SAKIP
- e. Keterbatasan anggaran dalam mencapai indikator kinerja.

## B. Rekomendasi

Solusi yang akan dilakukan agar target indikator kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tercapai antara lain :

- a. Segera menyusun dokumen arsitektur dan Peta Rencana SPBE sesuai dengan ketentuan terbaru.
- b. Melakukan perbaikan implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil peningkatan AKIP dimasa yang akan datang.
- c. Melakukan kegiatan FGD terkait PPID mengenai Keterbukaan Informasi Publik sehingga setiap badan publik yang menggunakan anggaran negara wajib menyampaikan laporan keuangan dan dokumen lainnya.
- d. Sosialisasi dan Penerapan kepada OPD kenapa pentingnya penggunaan aplikasi e-Office ini untuk memudahkan dan kelancaran dalam hal administrasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJI) Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Tembilahan, Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
Persandian dan Statistik  
Kabupaten Indragiri Hilir



Dr. Trio Beni Putra, SE., MM  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19751126199802 1 001

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jalan Akasia Nomor 02, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau 29212,  
Email : diskominfops@inhilkab.go.id

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**Nomor : Kpts.188/HK/KOMINFOPERS/I/2024/09**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor : 000.8.6.3/2094/SETDA-ORG pada Bulan Desember 2023 tentang Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah dan Data Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 maka perlu menyusun Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023;
- c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik tahun 2023 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;


3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023;
11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir;
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini,  
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya,  
Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan  
Pada Tanggal : 09 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

  
Dr. TRIO BENI PUTRA, SE., MM  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19751126 199802 1 001

LAMPIRAN

Nomor : Kpts.188/HK/KOMINFOPERS/1/2024/09

Tanggal : 09 Januari 2024

**PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

**TAHUN 2023**

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

No	Nama	Jabatan	Ditunjuk Sebagai
1.	Dr. Trio Beni Putra, SE, MM	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Mohamad Yusuf, S.Sos, MM	Sekretaris	Ketua
3.	Handri Yanti, SE	Plh. Subkoordinator Substansi PEP	Sekretaris
4.	Agussalim, S.Pd.I	Kabid P4KSDKI	Anggota
5.	Yuyun Rakhyuna, S.Sos	Kabid P3A	Anggota
6.	Sarkawi, S.STP	Kabid PIMDKI	Anggota
7.	Riyad Rahim, S.Sos	Kabid Persantik	Anggota
8.	Muhammad Nur Indratno, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Yuli Astuti Wiraguna, SE., MM	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan di : Tembilahan  
Pada Tanggal : 09 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dr. TRIO BENI PUTRA, SE., MM  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19751126 199802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Nomor : 061/KOMINFOPERS/I/2023/18

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRIO BENI PUTA, SE, MM

Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN  
STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. MUHAMMAD WARDAN

Jabatan : BUPATI INDRAGIRI HILIR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, 09 januari 2023

Pihak Kedua,  
  
  
H. MUHAMMAD WARDAN

Pihak Pertama,  
  
  
TRIO BENI PUTRA, SE, MM  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 19751126 199802 1 001

LAMPIRAN


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	Nilai Keterbukaan Informasi	Nilai	97
		Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Secara Elektronik	Persen	17.65
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	Nilai	24
		Nilai AKIP Diskominfo	Nilai	70

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.920.600.693,-	APBD
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp. 13.565.381.815,-	APBD
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 1.816.792.000,-	APBD
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 107.900.000,-	APBD
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 50.500.000,-	APBD
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 23.461.174.508,-</b>	<b>APBD</b>

Tembilahan, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,  
  
**H. MUHAMMAD WARDAN**

Pihak Pertama,  
  
**TRIO BENI PUTRA, SE, MM**  
 Pembina Tk.I (IV/b)  
 NIP. 19751126 199802 1 001







**MONITORING EVALUASI HASIL RKPd KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TRIWULAN IV TAHUN 2023  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPd Perubahan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
				K	Rp (Juta)	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp (Juta)
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	10				
<b>2.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>2.016.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					4.117,71	7.621,57	6.539,48		2.956,50		21.235,26			
<b>2.016.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>7.428,87</b>	<b>72</b>	<b>950,23</b>	<b>69</b>	<b>2.019,62</b>	<b>56</b>	<b>1.450,03</b>	<b>60</b>	<b>1.665,43</b>	<b>100</b>	<b>6.085,31</b>
<b>2.016.01.02.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>20,69</b>	<b>51</b>	<b>5,57</b>	<b>13</b>	<b>3,66</b>	<b>13</b>	<b>4,80</b>	<b>13</b>	<b>3,77</b>	<b>90</b>	<b>17,80</b>
2.016.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	20,69	4	5,57	1	3,66	1	4,80	1	3,77	7	17,80
<b>2.016.01.02.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun Sesuai Standar</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>3.554,92</b>	<b>98</b>	<b>426,01</b>	<b>50</b>	<b>1.297,17</b>	<b>50</b>	<b>712,08</b>	<b>50</b>	<b>862,68</b>	<b>100</b>	<b>3297,94</b>
2.016.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	29	3.547,92	28	424,51	29	1.295,67	29	709,58	29	861,18	29	3290,94
2.016.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1	7,00	1	1,50	0	1,50	0	2,50	0	1,50	1	7,00
<b>2.016.01.02.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang Terpelihara</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>34,83</b>	<b>100</b>	<b>6,30</b>	<b>100</b>	<b>9,47</b>	<b>100</b>	<b>9,45</b>	<b>100</b>	<b>9,45</b>	<b>100</b>	<b>34,67</b>
2.016.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	34,83	1	6,30	1	9,47	1	9,45	1	9,45	1	34,67
<b>2.016.01.02.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>88,64</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>5,32</b>	<b>100</b>	<b>5,32</b>
2.016.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	30	68,94	0	-	30	68,37	0	-	0	-	30	68,37
2.016.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	19,70	0	-	2	10,64	0	-	1	5,32	3	15,96
<b>2.016.01.02.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran Dalam Kondisi Baik</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.028,31</b>	<b>46</b>	<b>125,97</b>	<b>36</b>	<b>157,02</b>	<b>25</b>	<b>106,85</b>	<b>43</b>	<b>370,05</b>	<b>100</b>	<b>759,89</b>
2.016.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	11,00	1	10,00	0	-	0	-	0	-	1	10,00
2.016.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	486,74	0	7,00	1	66,33	0	27,38	1	310,93	2	411,64
2.016.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	119,47	1	24,30	1	28,79	1	28,20	1	22,46	4	103,75
2.016.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	14,50	1	3,10	1	4,30	1	3,10	1	4,00	1	14,50
2.016.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	150	12,00	30	3,00	27	2,70	21	2,10	72	4,10	150	11,90
2.016.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	75	384,60	25	78,57	16	54,90	10	46,07	24	28,56	75	208,10
<b>2.016.01.02.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>2.323,66</b>	<b>100</b>	<b>335,89</b>	<b>100</b>	<b>393,14</b>	<b>100</b>	<b>608,95</b>	<b>100</b>	<b>411,61</b>	<b>100</b>	<b>1749,59</b>
2.016.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2,00	1	0,50	1	0,50	1	0,55	1	0,40	1	1,95
2.016.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	1.023,77	4	100,69	4	46,30	4	261,10	4	53,83	4	461,92
2.016.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.297,89	1	234,70	1	346,34	1	347,30	1	357,38	1	1.285,72
<b>2.016.01.02.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang Terpelihara dengan Baik</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>377,82</b>	<b>100</b>	<b>56,06</b>	<b>100</b>	<b>162,82</b>	<b>100</b>	<b>12,70</b>	<b>100</b>	<b>11,64</b>	<b>100</b>	<b>243,22</b>
2.016.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	38,39	3	14,40	3	7,65	3	4,70	3	8,46	3	35,21
2.016.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	294,35	2	7,00	2	154,07	2	7,00	2	1,98	2	170,05
2.016.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	45,08	3	34,66	3	1,10	3	1,00	3	1,20	3	37,96
<b>2.016.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik yang Terintegrasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>13.556,17</b>	<b>16</b>	<b>2.887,58</b>	<b>50</b>	<b>5.224,95</b>	<b>23</b>	<b>4.623,89</b>	<b>24</b>	<b>708,91</b>	<b>95</b>	<b>13.445,33</b>
<b>2.016.02.02.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Tersampaikan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>13.556,17</b>	<b>16</b>	<b>2.887,58</b>	<b>50</b>	<b>5.224,95</b>	<b>23</b>	<b>4.623,89</b>	<b>24</b>	<b>708,91</b>	<b>100</b>	<b>13.445,33</b>
2.016.02.02.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	15	1.496,66	3	-	10	1.099,00	1	147,00	1	244,80	15	1.490,80
2.016.02.02.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	80	11.558,18	20	2.824,00	40	3.995,00	5	4.400,00	15	322,91	80	11.541,91
2.016.02.02.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	20	138,14	4	13,81	17	29,18	12	18,50	2	44,51	35	106,00
2.016.02.02.01.012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	5	363,19	0	49,77	0	101,77	1	58,39	3	96,69	4	306,62
<b>2.016.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Jumlah Aplikasi PD yang jaringan Aplikasinya di awasi oleh Dinas Kominfo Pers Kab.Inhli</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.761,57</b>	<b>14</b>	<b>279,90</b>	<b>25</b>	<b>377,00</b>	<b>28</b>	<b>465,56</b>	<b>31</b>	<b>582,16</b>	<b>93</b>	<b>1704,62</b>
<b>2.016.03.02.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>920,29</b>	<b>21</b>	<b>111,50</b>	<b>29</b>	<b>216,76</b>	<b>17</b>	<b>75,45</b>	<b>10</b>	<b>446,75</b>	<b>78</b>	<b>850,46</b>
2.016.03.02.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	14	30,00	6	17,30	4	5,69	4	5,23	0	-	14	28,22
2.016.03.02.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	7	860,29	2	111,50	2	216,76	2	75,45	1	446,75	7	850,46
2.016.03.02.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	5	30,00	0	-	2	7,88	0	-	1	10,70	3	18,58
<b>2.016.03.02.02</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sistem Informasi Perangkat Daerah yang telah terintegrasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>841,28</b>	<b>4</b>	<b>168,40</b>	<b>17</b>	<b>160,24</b>	<b>38</b>	<b>390,11</b>	<b>50</b>	<b>135,41</b>	<b>100</b>	<b>854,16</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RKPD Perubahan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
				K	Rp (Juta)	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp (Juta)
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.016.03.02.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50,00	0	14,31	0	19,92	0	7,30	1	42,50	1	84,03
2.016.03.02.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	2	271,50	0	10,45	0	11,40	3	261,87	0	3,70	3	287,42
2.016.03.02.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	4	30,00	1	7,40	2	16,20	1	1,80	0	-	4	25,40
2.016.03.02.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	3	27,50	0	-	0	11,85	0	4,60	3	3,11	3	19,56
2.016.03.02.02.010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	47,50	0	4,95	0	7,90	0	10,01	1	15,01	1	37,87
2.016.03.02.02.012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	2	414,78	0	131,29	1	92,97	1	104,53	0	71,09	2	399,88
<b>2.020</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>						<b>32,54</b>		<b>53,25</b>		<b>3,99</b>		<b>17,50</b>		<b>107,28</b>
<b>2.020.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>						<b>32,54</b>	<b>0</b>	<b>53,25</b>	<b>0</b>	<b>3,99</b>	<b>100</b>	<b>17,50</b>	<b>100</b>	<b>107,28</b>
<b>2.020.02.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen Data Statistik Sektoral Daerah yg Tepat Waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>107,90</b>	<b>0</b>	<b>32,54</b>	<b>0</b>	<b>53,25</b>	<b>0</b>	<b>3,99</b>	<b>100</b>	<b>17,50</b>	<b>100</b>	<b>107,28</b>
2.020.02.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan	Dokumen	35	107,90	0	32,54	0	53,25	0	3,99	35	17,50	35	107,28
<b>2.021</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					<b>0</b>	<b>6,21</b>	<b>0</b>	<b>13,21</b>					<b>100</b>	<b>44,97</b>
<b>2.021.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase PD yang Menggunakan Sistem Persandian</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>50,50</b>	<b>0</b>	<b>6,21</b>	<b>0</b>	<b>13,21</b>	<b>50</b>	<b>12,19</b>	<b>50</b>	<b>13,36</b>	<b>100</b>	<b>44,97</b>
<b>2.021.02.02.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sistem Persandian</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>50,50</b>	<b>0</b>	<b>6,21</b>	<b>0</b>	<b>13,21</b>	<b>50</b>	<b>12,19</b>	<b>50</b>	<b>13,36</b>	<b>100</b>	<b>44,97</b>
2.021.02.02.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	2	50,50	0	6,21	0	13,21	1	12,186	1	13,36	2	44,97

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2023  
PER PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**

SATKER (KODE) : Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik (2.16.2.20.2.21.01.00)  
Bulan : Desember 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		VOLUME	DANA APBD				SISA DANA (Rp)	KETERANGAN SISA DANA
	KODE REKENING	NAMA		BIAYA (Rp) DPA	FISIK (%)	REALISASI			
						KEUANGAN			
						Rp	%		
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp 7.920.600.693	87,91	Rp 6.707.333.905	84,68	Rp 1.213.266.788	
1	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 21.519.000	100,00	Rp 17.806.500	82,75	Rp 3.712.500	
	2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Rp 21.519.000	100,00	Rp 17.806.500	85,26	Rp 3.712.500	
	2.16.01.2.01.06.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 Bulan	Rp 8.500.000	100,00	Rp 5.000.000	58,82	Rp 3.500.000	
	2.16.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1 Tahun	Rp 6.019.000	100,00	Rp 6.019.000	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Orang Kali	Rp 7.000.000	100,00	Rp 6.787.500	96,96	Rp 212.500	
2	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 4.081.909.495	82,24	Rp 3.297.948.250	80,79	Rp 783.961.245	
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	Rp 4.074.909.495	53,23	Rp 3.290.948.250	51,57	Rp 783.961.245	
	2.16.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Rp 1.731.138.749	85,00	Rp 1.453.409.700	83,96	Rp 277.729.049	
	2.16.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Rp 72.223.200	5,00	Rp 2.966.500	4,11	Rp 69.256.700	
	2.16.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1 Tahun	Rp 224.790.172	70,00	Rp 144.534.286	64,30	Rp 80.255.886	
	2.16.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Rp 8.666.784	1,00	Rp 59.330	0,68	Rp 8.607.454	
	2.16.01.2.02.015.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Rp 199.150.000	95,00	Rp 187.470.000	94,14	Rp 11.680.000	
	2.16.01.2.02.015.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Rp 46.200.000	70,00	Rp 30.580.000	66,19	Rp 15.620.000	
	2.16.01.2.02.015.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1 Tahun	Rp 39.103.750	65,00	Rp 24.695.000	63,15	Rp 14.408.750	
	2.16.01.2.02.015.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Rp 5.180.000	5,00	Rp 185.000	3,57	Rp 4.995.000	
	2.16.01.2.02.015.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Rp 114.961.438	80,00	Rp 90.669.840	78,87	Rp 24.291.598	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		VOLUME	DANA APBD				SISA DANA (Rp)	KETERANGAN SISA DANA
	KODE REKENING	NAMA		BIAYA (Rp) DPA	FISIK (%)	REALISASI			
						KEUANGAN			
						Rp	%		
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
	2.16.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Rp 6.083.280	3,00	Rp 144.840	2,38	Rp 5.938.440	
	2.16.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Rp 8.448.909	75,00	Rp 6.097.982	72,17	Rp 2.350.927	
	2.16.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Rp 28.893	63,00	Rp 17.474	60,48	Rp 11.419	
	2.16.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Rp 187.829.717	55,00	Rp 101.408.196	53,99	Rp 86.421.521	
	2.16.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Rp 4.002.796	95,00	Rp 3.725.000	93,06	Rp 277.796	
	2.16.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Rp 5.022.528	60,00	Rp 2.989.131	59,51	Rp 2.033.397	
	2.16.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Rp 173.348	6,00	Rp 7.120	4,11	Rp 166.228	
	2.16.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Rp 15.067.582	60,00	Rp 8.967.492	59,52	Rp 6.100.090	
	2.16.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Rp 520.016	6,00	Rp 21.359	4,11	Rp 498.657	
	2.16.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Rp 538.047.500	87,00	Rp 462.100.000	85,88	Rp 75.947.500	
	2.16.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Rp 13.000.000	5,00	Rp 500.000	3,85	Rp 12.500.000	
	2.16.01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Rp 195.378.333	87,00	Rp 166.100.000	85,01	Rp 29.278.333	
	2.16.01.2.02.01.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Rp 659.892.500	93,00	Rp 604.300.000	91,58	Rp 55.592.500	
	<b>2.16.01.2.02.05</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>Rp 7.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 7.000.000</b>	<b>100,00</b>	Rp -	
	2.16.01.2.02.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 Bulan	Rp 5.000.000	100,00	Rp 5.000.000	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.02.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1 tahun	Rp 2.000.000	100,00	Rp 2.000.000	100,00	Rp -	
<b>3</b>	<b>2.16.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Rp 34.828.200</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 34.828.200</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp -</b>	
	<b>2.16.01.2.03.02</b>	<b>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>Rp 34.828.200</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 34.828.200</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp -</b>	
	2.16.01.2.03.02.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1 Tahun	Rp 34.650.000	100,00	Rp 34.650.000	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.03.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non Asn	1 Tahun	Rp 79.200	100,00	Rp 79.200	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1 Tahun	Rp 99.000	100,00	Rp 99.000	100,00	Rp -	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		VOLUME	DANA APBD				SISA DANA (Rp)	KETERANGAN SISA DANA
	KODE REKENING	NAMA		BIAYA (Rp) DPA	FISIK (%)	REALISASI			
						KEUANGAN			
						Rp	%		
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 89.895.000	97,67	Rp 84.330.450	93,81	Rp 5.564.550	
	2.16.01.2.03.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	Rp 20.960.000	90,00	Rp 15.960.000	68,49	Rp 5.000.000	
	2.16.01.2.03.02.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3 Orang X 1Kali	Rp 16.500.000	90,00	Rp 13.500.000	81,82	Rp 3.000.000	
	2.16.01.2.03.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Perjalanan Dinas	Orang /Hari	Rp 4.460.000	90,00	Rp 2.460.000	55,16	Rp 2.000.000	
	2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	Rp 68.935.000	100,00	Rp 68.370.450	99,18	Rp 564.550	
	2.16.01.2.03.02.5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rupiah	Rp 68.935.000	100,00	Rp 68.370.450	99,18	Rp 564.550	
5	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 955.731.903	91,42	Rp 759.886.637	79,51	Rp 195.845.266	
	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Rp 10.000.000	100,00	Rp 10.000.000	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.06.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Paket	Rp 10.000.000	100,00	Rp 10.000.000	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	Rp 417.252.000	100,00	Rp 411.636.880	95,13	Rp 5.615.120	
	2.16.01.2.06.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 OB	Rp 7.000.000	100,00	Rp 7.000.000	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.06.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	1 Orang x 3 Bulan	Rp 2.040.000	100,00	Rp 2.040.000	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Pak/Lusin	Rp 58.212.000	100,00	Rp 58.000.000	99,64	Rp 212.000	
	2.16.01.2.06.02.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Ls	Rp 10.000.000	100,00	Rp 9.967.800	99,68	Rp 32.200	
	2.16.01.2.06.02.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Unit	Rp 5.000.000	100,00	Rp 4.978.350	99,57	Rp 21.650	
	2.16.01.2.06.02.5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	Rupiah	Rp 16.000.000	100,00	Rp 15.312.500	95,70	Rp 687.500	
	2.16.01.2.06.02.5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	Rupiah	Rp 7.000.000	100,00	Rp 4.000.000	57,14	Rp 3.000.000	
	2.16.01.2.06.02.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Rupiah	Rp 28.400.000	100,00	Rp 28.389.380	99,96	Rp 10.620	
	2.16.01.2.06.02.5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rupiah	Rp 191.600.000	100,00	Rp 190.459.350	99,40	Rp 1.140.650	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		VOLUME	DANA APBD				SISA DANA (Rp)	KETERANGAN SISA DANA
	KODE REKENING	NAMA		BIAYA (Rp) DPA	FISIK (%)	REALISASI			
						KEUANGAN			
						Rp	%		
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
	2.16.01.2.06.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Unit	Rp 81.000.000	100,00	Rp 81.000.000	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.06.02.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Unit	Rp 11.000.000	100,00	Rp 10.489.500	95,36	Rp 510.500	
	<b>2.16.01.2.06.04</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>4 Paket</b>	<b>Rp 119.473.903</b>	<b>98,00</b>	<b>Rp 103.747.617</b>	<b>94,31</b>	<b>Rp 15.726.286</b>	
	2.16.01.2.06.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 OB	Rp 6.000.000	100,00	Rp 6.000.000	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.06.04.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Liter	Rp 55.243.903	90,00	Rp 39.536.617	71,57	Rp 15.707.286	
	2.16.01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Kotak	Rp 3.990.000	100,00	Rp 3.990.000	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Kotak	Rp 45.240.000	100,00	Rp 45.221.000	99,96	Rp 19.000	
	2.16.01.2.06.04.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Porsi	Rp 9.000.000	100,00	Rp 9.000.000	100,00	Rp -	
	<b>2.16.01.2.06.05</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1 Paket</b>	<b>Rp 14.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 14.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp -</b>	
	2.16.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1 Tahun	Rp 14.500.000	100,00	Rp 14.500.000	100,00	Rp -	
	<b>2.16.01.2.06.06</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>150 Dokumen</b>	<b>Rp 12.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 11.900.000</b>	<b>99,17</b>	<b>Rp 100.000</b>	
	2.16.01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rupiah	Rp 12.000.000	100,00	Rp 11.900.000	99,17	Rp 100.000	
	<b>2.16.01.2.06.09</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>75 Laporan</b>	<b>Rp 382.506.000</b>	<b>80,00</b>	<b>Rp 208.102.140</b>	<b>54,40</b>	<b>Rp 174.403.860</b>	
	2.16.01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Paket	Rp 382.506.000	80,00	Rp 208.102.140	54,40	Rp 174.403.860	
<b>6</b>	<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Rp 2.469.894.495</b>	<b>94,72</b>	<b>Rp 2.266.557.168</b>	<b>91,77</b>	<b>Rp 203.337.327</b>	
	<b>2.16.01.2.08.01</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>1 laporan</b>	<b>Rp 2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp -</b>	
	2.16.01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Buah	Rp 2.000.000	100,00	Rp 2.000.000	100,00	Rp -	
	<b>2.16.01.2.08.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>Rp 1.170.000.000</b>	<b>65,00</b>	<b>Rp 967.141.708</b>	<b>61,83</b>	<b>Rp 202.858.292</b>	
	2.16.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1 Tahun	Rp 175.890.913	100,00	Rp 172.539.244	98,09	Rp 3.351.669	
	2.16.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1 Tahun	Rp 909.160.112	95,00	Rp 794.602.464	87,40	Rp 114.557.648	
	2.16.01.2.08.02.5.1.02.02.04.0410	Balanja Sewa Peralatan Jaringan	1 Tahun	Rp 84.948.975	0,00	Rp -	0,00	Rp 84.948.975	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		VOLUME	DANA APBD				SISA DANA (Rp)	KETERANGAN SISA DANA
	KODE REKENING	NAMA		BIAYA (Rp) DPA	FISIK (%)	REALISASI			
						KEUANGAN			
						Rp	%		
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
	<b>2.16.01.2.08.04</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>1 Laporan</b>	Rp 1.297.894.495	100,00	Rp 1.297.415.460	97,28	Rp 479.035	
	2.16.01.2.08.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 OB	Rp 9.000.000	100,00	Rp 9.000.000	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	10 OB	Rp 1.395.000	100,00	Rp 1.319.250	94,57	Rp 75.750	
	2.16.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Paket	Rp 825.000	100,00	Rp 810.570	98,25	Rp 14.430	
	2.16.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0012	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Buah	Rp 500.000	100,00	Rp 396.460	79,29	Rp 103.540	
	2.16.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1 Tahun	Rp 12.431.275	100,00	Rp 12.247.780	98,52	Rp 183.495	
	2.16.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1 Tahun	Rp 936.650.000	100,00	Rp 936.650.000	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1 Tahun	Rp 192.500.000	100,00	Rp 192.500.000	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1 Tahun	Rp 23.100.000	100,00	Rp 23.100.000	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1 Tahun	Rp 11.550.000	100,00	Rp 11.550.000	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1 Tahun	Rp 103.950.000	100,00	Rp 103.950.000	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.08.045.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1 Tahun	Rp 2.650.320	100,00	Rp 2.618.400	98,80	Rp 31.920	
	2.16.01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN	1 Tahun	Rp 3.342.900	100,00	Rp 3.273.000	97,91	Rp 69.900	
<b>7</b>	<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Rp 266.822.600	93,25	Rp 245.976.700	92,19	Rp 20.845.900	
	<b>2.16.01.2.09.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>3 Unit</b>	Rp 38.390.600	100,00	Rp 36.957.000	88,06	Rp 1.433.600	
	2.16.01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3 Unit	Rp 6.000.000	100,00	Rp 4.567.000	76,12	Rp 1.433.000	
	2.16.01.2.09.02.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1 Tahun	Rp 32.390.600	100,00	Rp 32.390.000	100,00	Rp 600	
	<b>2.16.01.2.09.09</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>2 Unit</b>	Rp 190.352.000	77,50	Rp 171.056.500	76,21	Rp 19.295.500	
	2.16.01.2.09.09.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 OB	Rp 3.900.000	100,00	Rp 3.900.000	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.09.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10 OB	Rp 2.040.000	100,00	Rp 2.040.000	100,00	Rp -	
	2.16.01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	LS	Rp 164.412.000	100,00	Rp 164.116.500	99,82	Rp 295.500	
	2.16.01.2.09.09.5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	LS	Rp 20.000.000	10,00	Rp 1.000.000	5,00	Rp 19.000.000	
	<b>2.16.01.2.09.11</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>3 Unit</b>	Rp 38.080.000	100,00	Rp 37.963.200	99,82	Rp 116.800	
	2.16.01.2.09.09.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1 Tahun	Rp 33.080.000	100,00	Rp 32.963.200	99,65	Rp 116.800	
	2.16.01.2.09.09.5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1 Tahun	Rp 5.000.000	100,00	Rp 5.000.000	100,00	Rp -	
<b>2</b>	<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		Rp 13.565.381.815	99,55	Rp 13.445.345.839	99,12	Rp 120.035.976	
<b>1</b>	<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		Rp 13.565.381.815	99,55	Rp 13.445.345.839	99,12	Rp 120.035.976	
	<b>2.16.02.2.01.04</b>	<b>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</b>	<b>15 Dokumen</b>	Rp 1.496.700.000	100,00	Rp 1.490.804.979	94,17	Rp 5.895.021	
	2.16.02.2.01.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 OB	Rp 25.000.000	100,00	Rp 25.000.000	100,00	Rp -	
	2.16.02.2.01.04.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Kegiatan/Menit	Rp 1.438.000.000	100,00	Rp 1.437.999.979	100,00	Rp 21	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		VOLUME	DANA APBD				SISA DANA (Rp)	KETERANGAN SISA DANA
	KODE REKENING	NAMA		BIAYA (Rp) DPA	FISIK (%)	REALISASI			
						KEUANGAN			
						Rp	%		
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
	2.16.02.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Paket	Rp 33.700.000	100,00	Rp 27.805.000	82,51	Rp 5.895.000	
	<b>2.16.02.2.01.05</b>	<b>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</b>	<b>80 Dokumen</b>	<b>Rp 11.567.352.015</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 11.541.914.506</b>	<b>96,63</b>	<b>Rp 25.437.509</b>	
	2.16.02.2.01.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 OB	Rp 34.000.000	100,00	Rp 34.000.000	100,00	Rp -	
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Paket	Rp 7.542.500	100,00	Rp 3.751.862	49,74	Rp 3.790.638	
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1 Tahun	Rp 231.482.500	100,00	Rp 229.970.445	99,35	Rp 1.512.055	
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Paket	Rp 3.000.000	100,00	Rp 3.000.000	100,00	Rp -	
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Porsi	Rp 13.228.000	100,00	Rp 13.038.500	98,57	Rp 189.500	
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Porsi	Rp 80.000.000	100,00	Rp 78.670.000	98,34	Rp 1.330.000	
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Porsi	Rp 25.920.000	100,00	Rp 25.920.000	100,00	Rp -	
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	Rupiah	Rp 50.000.000	100,00	Rp 50.000.000	100,00	Rp -	
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	Rupiah	Rp 24.300.000	100,00	Rp 24.175.800	99,49	Rp 124.200	
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Orang/Kali	Rp 6.100.000	100,00	Rp 6.100.000	100,00	Rp -	
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Orang/Bulan	Rp 28.950.000	100,00	Rp 19.500.000	67,36	Rp 9.450.000	
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Orang/Bulan	Rp 33.000.000	100,00	Rp 33.000.000	100,00	Rp -	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		VOLUME	DANA APBD					SISA DANA (Rp)	KETERANGAN SISA DANA
	KODE REKENING	NAMA		BIAYA (Rp) DPA	FISIK (%)	REALISASI				
						KEUANGAN				
						Rp	%			
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Orang/Bulan	Rp 45.000.000	100,00	Rp 45.000.000	100,00	Rp -		
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Orang/Hari	Rp 60.000.000	100,00	Rp 60.000.000	100,00	Rp -		
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	Rupiah	Rp 10.063.590.000	100,00	Rp 10.063.590.000	100,00	Rp -		
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Rupiah	Rp 70.000.000	100,00	Rp 70.000.000	100,00	Rp -		
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Rupiah	Rp 15.000.000	100,00	Rp 15.000.000	100,00	Rp -		
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	Rupiah	Rp 3.500.000	100,00	Rp 3.500.000	100,00	Rp -		
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	Rupiah	Rp 3.200.000	100,00	Rp 3.200.000	100,00	Rp -		
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	Rupiah	Rp 10.000.000	100,00	Rp 10.000.000	100,00	Rp -		
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Rupiah	Rp 15.000.000	100,00	Rp 15.000.000	100,00	Rp -		
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rupiah	Rp 4.981.015	100,00	Rp 4.900.000	98,37	Rp 81.015		
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rupiah	Rp 157.500.000	100,00	Rp 157.280.000	99,86	Rp 220.000		
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Paket	Rp 410.058.000	100,00	Rp 401.317.899	97,87	Rp 8.740.101		
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rupiah	Rp 12.000.000	100,00	Rp 12.000.000	100,00	Rp -		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		VOLUME	DANA APBD					SISA DANA (Rp)	KETERANGAN SISA DANA
	KODE REKENING	NAMA		BIAYA (Rp) DPA	FISIK (%)	REALISASI				
						KEUANGAN				
						Rp	%			
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	
	2.16.02.2.01.05.5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Rupiah	Rp 10.000.000	100,00	Rp 10.000.000	100,00	Rp -		
	2.16.02.2.01.05.5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rupiah	Rp 150.000.000	100,00	Rp 150.000.000	100,00	Rp -		
	<b>2.16.02.2.01.06</b>	<b>Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>20 Dokumen</b>	<b>Rp 138.139.900</b>	<b>88,67</b>	<b>Rp 106.008.900</b>	<b>82,08</b>	<b>Rp 32.131.000</b>		
	2.16.02.2.01.06.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 OB	Rp 11.000.000	100,00	Rp 9.300.000	84,55	Rp 1.700.000		
	2.16.02.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1 Tahun	Rp 3.717.900	80,00	Rp 2.764.300	74,35	Rp 953.600		
	2.16.02.2.01.06.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1 Tahun	Rp 500.000	100,00	Rp 500.000	100,00	Rp -		
	2.16.02.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 Tahun	Rp 4.000.000	75,00	Rp 3.000.000	75,00	Rp 1.000.000		
	2.16.02.2.01.06.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 OK	Rp 12.950.000	87,00	Rp 10.800.000	83,40	Rp 2.150.000		
	2.16.02.2.01.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Paket	Rp 105.972.000	90,00	Rp 79.644.600	75,16	Rp 26.327.400		
	<b>2.16.02.2.01.12</b>	<b>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>Rp 363.189.900</b>	<b>85,14</b>	<b>Rp 306.617.454</b>	<b>83,91</b>	<b>Rp 56.572.446</b>		
	2.16.02.2.01.12.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 OB	Rp 17.000.000	100,00	Rp 17.000.000	100,00	Rp -		
	2.16.02.2.01.12.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Lembar	Rp 861.900	100,00	Rp 861.900	100,00	Rp -		
	2.16.02.2.01.12.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Porsi	Rp 2.400.000	100,00	Rp 2.400.000	100,00	Rp -		
	2.16.02.2.01.12.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Kali	Rp 32.000.000	6,00	Rp 1.575.977	4,92	Rp 30.424.023		
	2.16.02.2.01.12.5.1.02.02.04.0147	Belanja Sewa Alat Komunikasi Satelit	Rupiah	Rp 120.000.000	100,00	Rp 118.928.565	99,11	Rp 1.071.435		
	2.16.02.2.01.12.5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	Rupiah	Rp 24.900.000	100,00	Rp 24.450.000	98,19	Rp 450.000		
	2.16.02.2.01.12.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Paket	Rp 166.028.000	90,00	Rp 141.401.012	85,17	Rp 24.626.988		
<b>3</b>	<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>		<b>Rp 1.816.792.000</b>	<b>96,62</b>	<b>Rp 1.680.554.775</b>	<b>92,50</b>	<b>Rp 136.237.225</b>		
<b>1</b>	<b>2.16.03.2.01.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Rp 920.292.000</b>	<b>98,57</b>	<b>Rp 877.360.606</b>	<b>95,34</b>	<b>Rp 42.931.394</b>		
	<b>2.16.03.2.01.01</b>	<b>Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota</b>	<b>14 Domain</b>	<b>Rp 30.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 19.109.319</b>	<b>80,67</b>	<b>Rp 10.890.681</b>		
	2.16.03.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Buah/Lembar	Rp 1.224.000	100,00	Rp 1.224.000	100,00	Rp -		
	2.16.03.2.01.01.5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	Rupiah	Rp 10.000.000	100,00	Rp 10.000.000	100,00	Rp -		
	2.16.03.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Paket	Rp 18.776.000	100,00	Rp 7.885.319	42,00	Rp 10.890.681		
	<b>2.16.03.2.01.02</b>	<b>Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>Rp 860.292.000</b>	<b>99,62</b>	<b>Rp 844.426.287</b>	<b>97,97</b>	<b>Rp 15.865.713</b>		
	2.16.03.2.01.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 OB	Rp 22.000.000	100,00	Rp 22.000.000	100,00	Rp -		
	2.16.03.2.01.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10 OB	Rp 2.040.000	100,00	Rp 2.040.000	100,00	Rp -		
	2.16.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Rp 3.733.000	100,00	Rp 3.403.000	91,16	Rp 330.000		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		VOLUME	DANA APBD				SISA DANA (Rp)	KETERANGAN SISA DANA
	KODE REKENING	NAMA		BIAYA (Rp) DPA	FISIK (%)	REALISASI			
						KEUANGAN			
						Rp	%		
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
	2.16.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Lembar/buah/buku	Rp 4.657.000	100,00	Rp 4.657.000	100,00	Rp -	
	2.16.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Porsi	Rp 11.800.000	100,00	Rp 11.756.800	99,63	Rp 43.200	
	2.16.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10 OB	Rp 47.550.000	95,00	Rp 41.250.000	86,75	Rp 6.300.000	
	2.16.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10 OB	Rp 62.000.000	100,00	Rp 62.000.000	100,00	Rp -	
	2.16.03.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Paket	Rp 259.512.000	100,00	Rp 250.764.087	96,63	Rp 8.747.913	
	2.16.03.2.01.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rupiah	Rp 70.000.000	100,00	Rp 69.648.000	99,50	Rp 352.000	
	2.16.03.2.01.02.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rupiah	Rp 36.000.000	100,00	Rp 35.997.400	99,99	Rp 2.600	
	2.16.03.2.01.02.5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	Rupiah	Rp 201.000.000	100,00	Rp 201.000.000	100,00	Rp -	
	2.16.03.2.01.02.5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	Rupiah	Rp 90.000.000	100,00	Rp 89.910.000	99,90	Rp 90.000	
	2.16.03.2.01.02.5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	Rupiah	Rp 50.000.000	100,00	Rp 50.000.000	100,00	Rp -	
	<b>2.16.03.2.01.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</b>	<b>5 Unit</b>	<b>Rp 30.000.000</b>	<b>67,50</b>	<b>Rp 13.825.000</b>	<b>56,50</b>	<b>Rp 16.175.000</b>	
	2.16.03.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Buah/lembar/buku	Rp 4.430.000	70,00	Rp 2.500.000	56,43	Rp 1.930.000	
	2.16.03.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Porsi	Rp 360.000	100,00	Rp 360.000	100,00	Rp -	
	2.16.03.2.01.03.5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	Rupiah	Rp 9.450.000	0,00	Rp -	0,00	Rp 9.450.000	
	2.16.03.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Paket	Rp 15.760.000	100,00	Rp 10.965.000	69,57	Rp 4.795.000	
<b>2</b>	<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan E-Government Di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota</b>		<b>Rp 896.500.000</b>	<b>94,61</b>	<b>Rp 803.194.169</b>	<b>89,59</b>	<b>Rp 93.305.831</b>	
	<b>2.16.03.2.02.01</b>	<b>Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>Rp 50.000.000</b>	<b>99,33</b>	<b>Rp 47.475.999</b>	<b>90,55</b>	<b>Rp 2.524.001</b>	
	2.16.03.2.02.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 OB	Rp 14.500.000	98,00	Rp 13.900.000	95,86	Rp 600.000	
	2.16.03.2.02.01.5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	Rupiah	Rp 27.620.000	100,00	Rp 27.595.999	99,91	Rp 24.001	
	2.16.03.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Paket	Rp 7.880.000	100,00	Rp 5.980.000	75,89	Rp 1.900.000	
	<b>2.16.03.2.02.03</b>	<b>Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</b>	<b>2 Unit</b>	<b>Rp 291.500.000</b>	<b>88,33</b>	<b>Rp 266.928.000</b>	<b>83,31</b>	<b>Rp 24.572.000</b>	
	2.16.03.2.02.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 OB	Rp 15.000.000	95,00	Rp 14.200.000	94,67	Rp 800.000	
	2.16.03.2.02.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3 OB	Rp 2.040.000	100,00	Rp 2.040.000	100,00	Rp -	
	2.16.03.2.02.03.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer lainnya	Rupiah	Rp 12.980.000	100,00	Rp 12.900.000	99,38	Rp 80.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		VOLUME	DANA APBD				SISA DANA (Rp)	KETERANGAN SISA DANA
	KODE REKENING	NAMA		BIAYA (Rp) DPA	FISIK (%)	REALISASI			
						KEUANGAN			
						Rp	%		
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
	2.16.03.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Paket	Rp 7.880.000	100,00	Rp 4.450.000	56,47	Rp 3.430.000	
	2.16.03.2.02.03.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rupiah	Rp 8.000.000	100,00	Rp 7.992.000	99,90	Rp 8.000	
	2.16.03.2.02.03.5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	Rupiah	Rp 4.000.000	100,00	Rp 3.996.000	99,90	Rp 4.000	
	2.16.03.2.02.03.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rupiah	Rp 199.500.000	100,00	Rp 199.350.000	99,92	Rp 150.000	
	2.16.03.2.02.03.5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Rupiah	Rp 20.000.000	0,00	Rp -	0,00	Rp 20.000.000	
	2.16.03.2.02.03.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rupiah	Rp 22.100.000	100,00	Rp 22.000.000	99,55	Rp 100.000	
	<b>2.16.03.2.02.07</b>	<b>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>	<b>4 Unit</b>	<b>Rp 30.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 21.114.760</b>	<b>58,70</b>	<b>Rp 8.885.240</b>	
	2.16.03.2.02.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Buah/lembar	Rp 1.360.000	100,00	Rp 397.000	29,19	Rp 963.000	
	2.16.03.2.02.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Porsi	Rp 4.820.000	100,00	Rp 2.870.000	59,54	Rp 1.950.000	
	2.16.03.2.02.07.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	OB	Rp 12.750.000	100,00	Rp 12.750.000	100,00	Rp -	
	2.16.03.2.02.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Paket	Rp 11.070.000	100,00	Rp 5.097.760	46,05	Rp 5.972.240	
	<b>2.16.03.2.02.08</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>Rp 27.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 24.052.000</b>	<b>89,09</b>	<b>Rp 3.448.000</b>	
	2.16.03.2.02.08.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 OB	Rp 5.000.000	100,00	Rp 5.000.000	100,00	Rp -	
	2.16.03.2.02.08.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Lembar	Rp 420.000	100,00	Rp 420.000	100,00	Rp -	
	2.16.03.2.02.08.5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	Rupiah	Rp 14.200.000	100,00	Rp 14.182.000	99,87	Rp 18.000	
	2.16.03.2.02.08.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Paket	Rp 7.880.000	100,00	Rp 4.450.000	56,47	Rp 3.430.000	
	<b>2.16.03.2.02.10</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>Rp 47.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 37.860.000</b>	<b>88,56</b>	<b>Rp 9.640.000</b>	
	2.16.03.2.02.10.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 OB	Rp 5.000.000	100,00	Rp 5.000.000	100,00	Rp -	
	2.16.03.2.02.10.5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Rupiah	Rp 10.000.000	100,00	Rp 9.900.000	99,00	Rp 100.000	
	2.16.03.2.02.10.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Rupiah	Rp 9.940.000	100,00	Rp 9.500.000	95,57	Rp 440.000	
	2.16.03.2.02.10.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Paket	Rp 22.560.000	100,00	Rp 13.460.000	59,66	Rp 9.100.000	
	<b>2.16.03.2.02.12</b>	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>Rp 450.000.000</b>	<b>88,20</b>	<b>Rp 405.763.410</b>	<b>86,40</b>	<b>Rp 44.236.590</b>	
	2.16.03.2.02.12.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	OB	Rp 15.600.000	98,00	Rp 14.800.000	94,87	Rp 800.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		VOLUME	DANA APBD				SISA DANA (Rp)	KETERANGAN SISA DANA
	KODE REKENING	NAMA		BIAYA (Rp) DPA	FISIK (%)	REALISASI			
						KEUANGAN			
						Rp	%		
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
	2.16.03.2.02.12.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rupiah	Rp 2.526.000	100,00	Rp 2.526.000	100,00	Rp -	
	2.16.03.2.02.12.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Porsi	Rp 4.500.000	100,00	Rp 4.417.500	98,17	Rp 82.500	
	2.16.03.2.02.12.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Porsi	Rp 6.000.000	100,00	Rp 6.000.000	100,00	Rp -	
	2.16.03.2.02.12.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Porsi	Rp 15.000.000	30,00	Rp 4.260.000	28,40	Rp 10.740.000	
	2.16.03.2.02.12.5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Orang/kali	Rp 10.000.000	100,00	Rp 10.000.000	100,00	Rp -	
	2.16.03.2.02.12.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Orang/bulan	Rp 5.200.000	100,00	Rp 5.200.000	100,00	Rp -	
	2.16.03.2.02.12.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Orang/bulan	Rp 60.000.000	100,00	Rp 59.250.000	98,75	Rp 750.000	
	2.16.03.2.02.12.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rupiah	Rp 1.000.000	100,00	Rp 1.000.000	100,00	Rp -	
	2.16.03.2.02.12.5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Rupiah	Rp 29.000.000	95,00	Rp 25.600.000	88,28	Rp 3.400.000	
	2.16.03.2.02.12.5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Rupiah	Rp 100.000.000	100,00	Rp 99.800.000	99,80	Rp 200.000	
	2.16.03.2.02.12.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rupiah	Rp 15.000.000	0,00	Rp -	0,00	Rp 15.000.000	
	2.16.03.2.02.12.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Paket	Rp 135.674.000	100,00	Rp 122.904.410	90,59	Rp 12.769.590	
	2.16.03.2.02.12.5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rupiah	Rp 14.500.000	100,00	Rp 14.152.500	97,60	Rp 347.500	
	2.16.03.2.02.12.5.2.02.06.04.0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	Rupiah	Rp 36.000.000	100,00	Rp 35.853.000	99,59	Rp 147.000	
<b>4</b>	<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>Rp 107.900.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 107.379.680</b>	<b>99,52</b>	<b>Rp 520.320</b>	
<b>1</b>	<b>2.20.02.2.01.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Rp 107.900.000</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 107.379.680</b>	<b>99,52</b>	<b>Rp 520.320</b>	
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	35 Dokumen	Rp 107.900.000	100,00	Rp 107.379.680	97,88	Rp 520.320	
	2.20.02.2.01.01.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 OB	Rp 13.000.000	100,00	Rp 13.000.000	100,00	Rp -	
	2.20.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0057	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Lembar	Rp 5.302.000	100,00	Rp 5.232.400	98,69	Rp 69.600	
	2.20.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Porsi	Rp 4.160.000	100,00	Rp 3.780.000	90,87	Rp 380.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		VOLUME	DANA APBD				SISA DANA (Rp)	KETERANGAN SISA DANA
	KODE REKENING	NAMA		BIAYA (Rp) DPA	FISIK (%)	REALISASI			
						KEUANGAN			
						Rp	%		
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
	2.20.02.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	OB	Rp 45.600.000	100,00	Rp 45.600.000	100,00	Rp -	
	2.20.02.2.01.01.5.2.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Paket	Rp 39.838.000	100,00	Rp 39.767.280	99,82	Rp 70.720	
5	2.21.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		Rp 50.500.000	100,00	Rp 44.233.760	87,59	Rp 6.266.240	
1	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp 50.500.000	100,00	Rp 44.233.760	87,59	Rp 6.266.240	
	2.21.02.2.01.03	<b>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</b>	2 Laporan	Rp 50.500.000	100,00	Rp 44.233.760	87,04	Rp 6.266.240	
	2.21.02.2.01.03.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	OB	Rp 14.500.000	100,00	Rp 11.000.000	75,86	Rp 3.500.000	
	2.21.02.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Buku/Lembar	Rp 2.320.000	100,00	Rp 2.320.000	100,00	Rp -	
	2.21.02.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	OrangxKali	Rp 4.800.000	100,00	Rp 4.116.000	85,75	Rp 684.000	
	2.21.02.2.01.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	OB	Rp 21.000.000	100,00	Rp 21.000.000	100,00	Rp -	
	2.21.02.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Paket	Rp 7.880.000	100,00	Rp 5.797.760	73,58	Rp 2.082.240	
		<b>Jumlah</b>		Rp 23.461.174.508	95,40	Rp 21.984.847.959,00	93,71	Rp 1.476.326.549	Target Desember %

## PENGHARGAAN





**BUPATI INDRAGIRI HILIR**

*Piagam Penghargaan*

Nomor : 900/ 94/SETDA-ADM.PEMB

Diberikan Kepada :

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Atas Partisipasi Realisasi Fisik dan Keuangan  
Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2023  
Kabupaten Indragiri Hilir

Tembilahan, Januari 2024

Pj. Bupati Indragiri Hilir,

Herman



**Gerakan Menuju**  
**Smart City**  
**2023**

**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



HARI PERS NASIONAL IHPN SUMATERA UTARA 2023

**HARI PERS NASIONAL IHPN SUMATERA UTARA 2023**

**"PERS BEBAS, DEMOKRASI BERMARTABAT"**

Medan, 9 Februari 2023



